

>> **DISPANGTAN**

LAKIP **2023**

DINAS PANGAN
DAN PERTANIAN
KOTA CIMAHI
2023



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2023 ini merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang ada di lingkup Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi untuk Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan LAKIP Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2023 ini merupakan tahun pertama periode RPD Kota Cimahi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023 - 2026, Rencana Strategis 2023-2026, Rencana Kerja Perubahan 2023, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dinas Pangan dan Pertanian Perubahan Kota Cimahi tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menjadi bahan evaluasi dalam pencapaian target kinerja agar lebih baik di masa yang akan datang. Keselarasan indikator kinerja dengan program dan kegiatan menjadi hal utama dalam pencapaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi.

Cimahi, 31 Januari 2024

Kepala Dinas Pangan dan
Pertanian kota Cimahi



TITA MARIAM, S.Pt, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197007061998032006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tata Pemerintah pada Perangkat Daerah yang baik merupakan refleksi dari Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan dan dikelola dengan baik. Sebagaimana halnya Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah yang merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan urusan Bidang Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan yang selalu berusaha berinovasi untuk meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan dan memaksimalkan potensi yang ada di bidang Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan di Kota Cimahi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi ini merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang ada di lingkup Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi untuk Tahun Anggaran 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2023 ini menyajikan target, realisasi, dan capaian kinerja selama Tahun 2023. Pagu anggaran yang digunakan Rp. 13.228.060.618,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.343.118.827,00,- jika diukur dengan persentase capaian realisasi keuangan adalah sebesar 93,31%.

Dalam dokumen perjanjian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai yaitu : (1) Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik yang mempunyai indikator Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian, sasaran strategis ke 2 (dua) yaitu : Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan yang memiliki 3 (tiga) indikator yaitu 2. Nilai PPH Ketersediaan, Skor PPH Ketersediaan dan Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian. Sasaran strategis ke 3 (tiga) yaitu : Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah dengan indikator cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan.

Pada tahun 2023 Dinas Pangan dan Pertanian telah melaksanakan 10 (sepuluh) program yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang dan 9 (sembilan) program teknis urusan wajib pangan, urusan pilihan pertanian dan perikanan dan kelautan. Adapun gambaran capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi di Tahun 2023 di ranah pencapaian kinerja eselon II, dari 5 (lima) indikator sasaran strategis terdapat 3 (tiga) indikator yang tercapai melebihi target yang ditentukan dan telah sesuai yaitu Nilai evaluasi reformasi birokrasi Disipangtan tercapai 256,8%, selanjutnya indikator Skor PPH Ketersediaan tercapai sebesar 131,95% dan Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian tercapai sebesar 117,42%

dan Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan tercapai sebesar 100%. Terdapat 1 (satu) indikator sasaran strategis yang capaiannya mendekati target yaitu Nilai PPH Ketersediaan, yang capaiannya sebesar 92,89% dan 1 (satu) indikator sasaran strategis yang belum release pencapaiannya yaitu nilai evaluasi reformasi birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian.

Secara umum pencapaian target indikator kinerja utama (IKU) pada tahun 2023 sudah tercapai dengan baik, untuk tahun kedepannya tetap harus dilakukan koordinasi dan evaluasi program dan kegiatan dikarenakan ada beberapa kendala terkait indikator target perencanaan yaitu pemasangan target indikator yang belum sesuai agar di periode berikutnya capaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian lebih optimal.

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi maka terbentuklah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, dimana sebelumnya merupakan salah satu bidang di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan, dan Pertanian (Diskopindagtan) Kota Cimahi, yaitu Bidang Pertanian.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara mernadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan RB No. 53 Tahun 2014).

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2023 serta sebagai umpan balik untuk perbaikan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja 2023 dan

Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini meliputi pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran – sasaran strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, selama kurun waktu satu tahun di Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan LAKIP Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi ini adalah untuk melaporkan dan menginformasikan hasil capaian kinerja Dinas Pangan dan

Pertanian sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan target yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran 2023, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian serta sebagai umpan balik untuk perbaikan yang berkesinambungan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi pada tahun-tahun mendatang.

1.1 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi No. 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325) Kedudukan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi adalah unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang pangan dan pertanian serta kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas pangan dan Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi adalah memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan urusan bidang pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Sedangkan Fungsi Dinas Pangan dan Pertanian adalah:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
3. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pembinaan tugas bidang pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan
4. Pengelolaan administrasi kesekretariatan;
5. Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas;
6. Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
7. Pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;

8. Pengkoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
9. Pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10. Pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

1.3 Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Dengan mengetahui isu strategis, Perangkat Daerah dapat menganalisis bagian tertentu yang harus dimaksimalkan secara optimal, penerapan strategi yang relevan serta menentukan arah pengembangan organisasi. Pengidentifikasian isu-isu strategis juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam meningkatkan kinerja organisasi. Isu-isu strategis di bidang pangan, pertanian dan perikanan adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya angka tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kota Cimahi;
2. Masih belum optimalnya kualitas pembangunan ekonomi di Kota Cimahi;
3. Berkontribusi dalam rangka pengendalian inflasi di Kota Cimahi;
4. Belum optimalnya ketahanan pangan daerah;

5. Fluktuasi harga pangan;
6. Meningkatnya jumlah alih fungsi lahan;
7. Masih dijumpai kasus gizi di Kota Cimahi baik kecukupan maupun kualitasnya;
8. Regulasi yang implementatif untuk mendukung pelaksanaan tugas urusan pangan, pertanian dan perikanan;
9. Dukungan perubahan UPTD. Puskesmas menjadi BLUD;
10. Pendataan dan pemutakhiran data terkait urusan pangan, pertanian dan perikanan Kota Cimahi; dan
11. Sinergitas dan koordinasi antar SKPD dalam dukungan Ketahanan Pangan Kota Cimahi.

1.4 Kekuatan Pegawai

Jumlah pegawai di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi per 30 Desember 2023 adalah sebanyak 52 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 48 orang, tenaga PPPK 4 orang dan tenaga harian lepas (THL) sebanyak 26 orang.

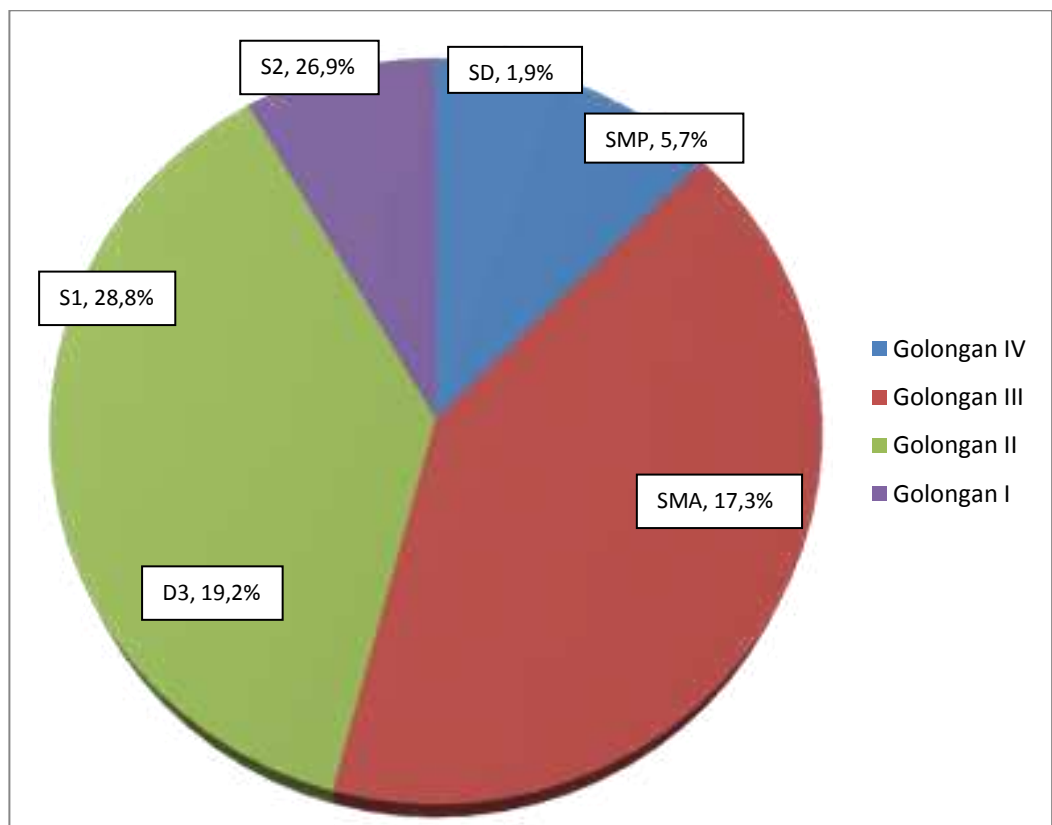
- a. Berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 1.1
Sumber Daya Aparatur Disipangtan Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1	SD	1	-	1
2	SMP/Sederajat	3	-	3
3	SMA/Sederajat	8	1	9
4	D3	6	4	10
5	S1	6	9	15

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
6	S2	3	11	14
	Jumlah	27	25	52

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, Desember 2023



Gambar 1.2 Sumber Daya Aparatur Dispangtan Berdasarkan Pendidikan

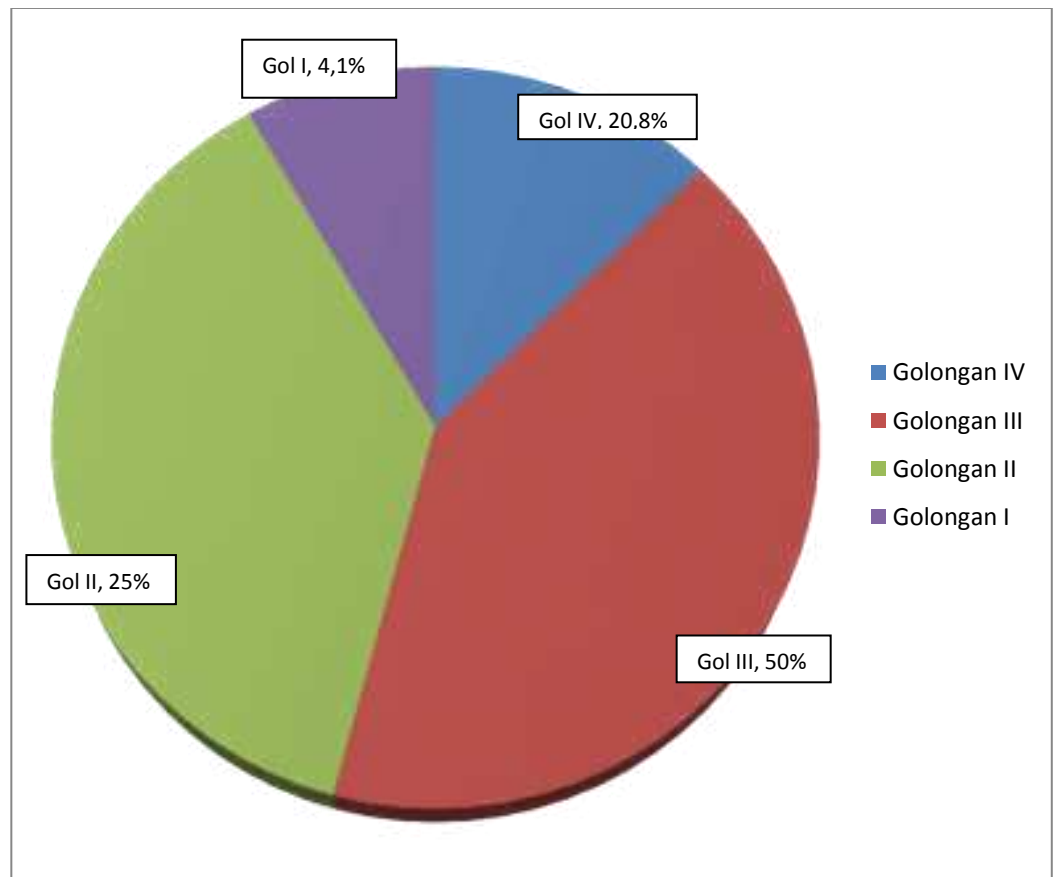
b. Berdasarkan golongan

Tabel 1.2
Sumber Daya Aparatur Dispangtan Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1	Golongan IV	3	7	10
2	Golongan III	10	14	24

3	Golongan II	9	3	12
4	Golongan I	2	-	2
	Jumlah	24	24	48

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, Desember 2023



Gambar 1.3 Sumber Daya Aparatur Dispangtan Berdasarkan Golongan

c. Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.3
Sumber Daya Aparatur Dispangtan Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala Dinas	-	1	1
2	Sekretaris	-	1	1
3	Kepala Bidang	1	1	2
4	Kepala Seksi	-	1	1
5	Kepala UPT	2	-	2
6	Kepala TU UPT	1	1	2
7	Kepala Sub Bag	-	1	1
8	Jabatan Fungsional Tertentu	2	7	9
9	Jabatan Fungsional Umum	18	11	1
10	PPPK	3	1	-
10	THL	-	-	-
	Jumlah	27	25	52

1.5 Keuangan

Dukungan pendanaan pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi pada tahun 2023 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni sebesar Rp.13.108.848.000,-, dan pada bulan Oktober 2023 disusunlah APBD Perubahan (APBD-P) 2023 sebagai upaya penyesuaian-penyesuaian terhadap Program,

Kegiatan dan Sub kegiatan di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan sebesar Rp. Rp.13.228.060.618,-Ringkasan APBD dan APBD-P 2023 di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi di tunjukan pada Tabel berikut:

Tabel 1.4
Ringkasan anggaran Dispangtan Tahun 2023

URAIAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
PENDAPATAN DAERAH		
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp.307.520.000	Rp.307.520.000
Retribusi Daerah	Rp.307.520.000	Rp.307.520.000
Jumlah Pendapatan	Rp.307.520.000	Rp.307.520.000
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI	Rp.12.961.811.000	Rp.12.915.236.162
Belanja Pegawai	Rp.8.480.443.675	Rp.8.631.579.113
Belanja Barang dan Jasa	Rp.4.481.367.325	Rp.4.283.657.049
BELANJA MODAL	Rp.147.037.000	Rp.312.824.456
Belanja modal peralatan dan mesin	Rp60.682.000	Rp159.802.456
Belanja modal aset tetap lainnya	Rp. 0	Rp20.000.000
Jumlah Belanja	Rp.13.108.848.000	Rp.13.228.060.618

Rincian program dan kegiatan dari APBD dan APBD-P Tahun 2023 pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 1.5
Ringkasan anggaran program dan kegiatan Dispangtan Tahun 2023

URAIAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA	Rp. 9.910.238.928	Rp. 9.998.410.292
Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 250.795.550	Rp. 90.795.350
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 8.480.443.675	Rp. 8.631.579.113

URAIAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 63.000.000	Rp. 60.916.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 277.921.850	Rp. 388.352.850
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 198.143.000	Rp. 223.846.186
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 433.768.613	Rp. 401.728.613
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 206.166.240	Rp. 201.192.180
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp. 752.692.368	Rp. 778.637.978
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp. 117.921.800	Rp. 153.867.550
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Rp. 209.822.550	Rp. 209.822.410
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rp. 424.948.018	Rp. 414.948.018
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp. 160.000.100	Rp. 154.020.100
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Rp. 29.999.900	Rp. 24.019.900
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 130.000.200	Rp. 130.000.200
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp. 78.743.800	Rp. 78.743.800
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 78.743.800	Rp. 78.743.800
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp. 671.738.320	Rp. 663.338.320
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Rp. 96.033.400	Rp. 87.633.400
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Rp. 575.704.920	Rp. 575.704.920
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp. 88.643.300	Rp. 130.303.300
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Rp. 88.643.300	Rp. 130.303.300
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp. 66.323.850	Rp. 49.043.850
Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 66.323.850	Rp. 49.043.850
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN	Rp. 956.075.284	Rp. 956.070.978

URAIAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 119.118.500	Rp. 126.557.444
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 59.252.000	Rp. 51.809.000
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 777.704.784	Rp. 777.704.784
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Rp. 9.382.600	Rp. 9.382.600
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.382.600	Rp. 9.382.600
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp. 415.009.450	Rp. 410.109.400
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rp. 415.009.450	Rp. 410.109.400
<i>Jumlah</i>	Rp.13.108.848.000	Rp.13.228.060.618

1.6 Sarana Prasarana

Kinerja yang baik tentu saja harus didukung oleh sarana prasarana penunjang kinerja yang baik. Sarana dan prasarana di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi beserta kondisinya bisa dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 1.6
Kondisi Sarana prasana Dispangtan Tahun 2023

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan Kondisi	Jumlah Kebutuhan	Ket.
1.	Alat Berat				
1.	Pompa Air	2 Unit	Baik		
2.	Pompa Airasil	2 Unit	2 Unit Rusak	2 Unit	
3.	Pompa Lain-lain	4 Unit	Baik		
4.	Portable Water Pump	1 Unit	Baik		
5.	Tractor Lain-lain	1 Unit	Baik		
6.	Transportable Water Pump	2 Unit	2 Unit Rusak	2 Unit	
2.	Alat Angkutan				
1	Roda 4	4 Unit	Baik	4 Unit	
2	Roda 3	2 Unit	2 Rusak Berat		

No.	Jenis Peralatan		Jumlah	Keterangan Kondisi	Jumlah Kebutuhan	Ket.
	3	Roda 2	5 Unit	Baik	6 Unit	
3.	Alat- alat Kantor dan Rumah Tangga :					
	1	AC	13 Unit	1 Unit Rusak	18 Unit	
	2	Air Blower	10 Unit	Baik		
	3	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1 Unit	Baik		
	4	Alat Kedokteran Poliklinik Lain-lain	17 Unit	Baik		
	5	Alat Kedokteran Umum Lain Lain	15 Unit	Baik		
	6	Alat Laboratorium Lainnya (Lain-Lain)	1 Unit	Baik		
	7	Alat Laboratorium Pertanian Lain-lain	3 Unit	Baik		
	8	Alat Laboratorium Umum Lain-lain	3 Unit	Baik		
	9	Alat Panen/Pengolahan Lain-lain	2 Unit	Baik		
	10	Alat Pasca Panen Lain-lain	4 Unit	Baik		
	11	Alat Pemadam Kebakaran (Alat Laboratorium Pertanian Lain-lain)	79 Unit	Baik		
	12	Alat Pemadam/Portable	1 Unit	Baik		
	13	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	30 Unit	Baik		
	14	Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain	22 Unit	Baik		
	15	Alat Pengering (Dryer)	1 Unit	Baik		
	17	Alat Pengukur Curah Hujan	1 Unit	Rusak		
	18	Alat Pengukur P.H. Tanah (Soil Tester)	4 Unit	Baik		
	19	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	3 Unit	Baik		
	20	Alat Perontokan (Thresher Pedal)	5 Unit	Baik		
	21	Alat Perontokan Mesin (Power Thresher)	1 Unit	Baik		
	22	Alat Processing Lain-lain	1 Unit	Baik		
	23	Alat Produksi Perikanan Lain-lain	9 unit	Baik		
	24	Alat Rumah Tangga Lain-lain	6 Unit	Baik		
	25	Alat Timbangan Lain-lain	14 Unit	Baik		
	26	Alat Ukur	1 Unit	Baik		
	27	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	3 Unit	Baik		
	28	Alat-alat Peternakan Lain-lain	12 Unit	Baik		
	29	Angkutan Barang Lain-lain	2 Unit	2 Unit Rusak	1 Unit	
	30	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	54 Unit	Baik		
	31	Bak Aquarium	40 Unit	Baik		
	32	Bak Fiberglass	27 Unit	Baik		
	33	Bak Pemeliharaan Sementara	18 Unit	Baik		
	34	Beater Unit (Mesin Penggiling)	1 Unit	Baik		
	35	Binocular Microscope (Alat	1 Unit	Baik		

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan Kondisi	Jumlah Kebutuhan	Ket.
	Laboratorium Microbiologi)				
36	Brandkas	1 Unit	Baik		
37	CCTV dan Perlengkapannya	2 Tempat	Baik		
39	Centrifuge	2 Unit	2 Unit Rusak	2 Unit	
40	Coffee Maker	1 unit	Baik		
41	Container	1 Unit	1 Unit Rusak		
42	CPU (Peralatan Personal Komputer)	29 Unit	15 Unit Rusak	38 Unit	
43	Desicator	2 Unit	Baik		
44	Disk Pack (Peralatan Mini Komputer)	1 Unit	1 Unit Rusak		
45	Dispenser	3 Unit	Baik		
46	Display (Rak)	2 Unit	Baik		
47	Electric Generating Set Lain-lain	1 Unit	Baik		
48	Elemeyer Glass	4 Unit	Baik		
49	Facsimile	2 Unit	2 Unit Rusak	1 Unit	
50	Filing Cabinet Besi	21 Unit	4 Unit Rusak		
51	Filter	4 Unit	Baik		
52	Freezer (Alat Laboratorium Patologi)	1 unit	1 Unit Rusak		
53	Freezer 70 Derajat C Centrifuge With Accesories	1 unit	1 Unit Rusak		
54	Gas Regulator	4 Unit	Baik		
55	Grinder	1 unit	Baik		
56	Gunting Lurus	1 unit	Baik		
57	Handy Cam	1 unit	Baik		
58	Handy Talky (HT)	8 Unit	Baik		
59	Kapal Terbang Sayap Tetap Mesin Turbin (Fuel Jet)	1 unit	Baik		
62	Kipas Angin	1 Unit	1 Unit Rusak		
63	Kitchen Set	2 Unit	Baik		
64	Kursi Biasa	9 Unit	Baik		
65	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2 Unit	Baik		
66	Kursi Kayu	50 Unit	Baik		
67	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4 Unit	Baik		
68	Kursi Lipat	3 unit	Baik		
69	Kursi Rapat	136 Unit	Baik		
70	Kursi Tamu	2 Unit	2 Unit Rusak	3 Set	
71	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1 Unit	Baik		
73	Lap Top/ Note Book	11 Unit	6 Unit Rusak	15 Unit	
74	Lemari Arsip (Besi & Kayu)	18 Unit	4 Unit Rusak		
77	Lemari Es	9 Unit	3 Unit Rusak		
80	Lemari Pakaian	3 unit	Baik		
82	Magnetic Ferofilter	1 unit	Baik		
83	Mayor Operasi Set	1 unit	Baik		
84	Meja Biro	21 Unit	5 Unit Rusak		
85	Meja Kerja Besi/Metal	5 Unit	Baik		
86	Meja Kerja Kayu	7 Unit	Baik		

No.	Jenis Peralatan		Jumlah	Keterangan Kondisi	Jumlah Kebutuhan	Ket.
	87	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	40 Unit	Baik		
	88	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3 Unit	Baik		
	89	Meja Makan Kayu	2 Unit	Baik		
	90	Meja Periksa Pasien	3 Unit	Baik		
	91	Meja Rapat	7 Unit	Baik		
	92	Meja Tambahan	2 Unit	Baik		
	93	Mesin Absensi	2 Unit	Baik		
	94	Mesin Bor Tangan	1 Unit	Baik		
	96	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	4 Unit	Baik		
	97	Mesin Las Listrik	1 Unit	Baik		
	98	Mesin Pemotong Rumput	6 Unit	2 Unit Rusak		
	99	Meubelair Lain-lain	1 Unit	Baik		
	100	Microscope	5 Unit	Baik		
	102	Minor Surgeri Set	3 Unit	Baik		
	103	Mixer	1 Unit	Baik		
	105	Mobile Operating Lamp	2 Unit	Baik		
	106	Nebulizer	1 Unit	1 Unit Rusak	3 Unit	
	107	Needle Holder	2 Unit	Baik		
	109	Operating Table Bedah	4 Unit	Baik		
	110	Oven	1 Unit	Baik		
	111	Overhead Projector	7 Unit	Baik		
	113	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	10 Unit	Baik		
	116	Peralatan Pemetaan Ukur Lain-lain	1 Unit	Baik		
	119	Perkakas Standar Lain-lain	1 Unit	Baik		
	121	Pesawat Telephone	3 Unit	3 Unit Rusak	1 Unit	
	122	PH Meter	2 Unit	Baik		
	123	Pick Up	1 Unit	Baik		Accessories Pick Up
	128	Printer (Peralatan Mini Komputer)	25 Unit	17 Unit Rusak	35 Unit	
	129	Rak Besi	3 Unit	Baik		
	130	Rak Kayu	1 Unit	Baik		
	131	Rak Pengering	1 Unit	Baik		
	132	Rak Peralatan	1 Unit	Baik		
	133	Refrigerator	1 Unit	1 Unit Rusak		
	134	Rice Cooker (Alat Laboratorium Makanan)	1 Unit	Baik		
	135	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1 Unit	Baik	2 Unit	
	138	Slicer	1 Unit	Baik		
	139	Slide Projector (Lapangan)	1 Unit	Baik		
	140	Sofa	5 unit	2 Unit Rusak		
	141	Sound System	2 unit	Baik		
	142	Stereo Generator Fm	1 Unit	1 Unit Rusak		
	143	Sterilisator	3 Unit	1 Unit Rusak		
	144	Tabung Gas	4 Unit	Baik		

No.	Jenis Peralatan		Jumlah	Keterangan Kondisi	Jumlah Kebutuhan	Ket.
	145	Tabung Oksigen	8 Unit	Baik		
	146	Tangga Aluminium	1 Unit	1 Unit Rusak	3 Unit	
	147	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2 Unit	2 Unit Rusak		
	148	Televisi	9 Unit	2 Unit Rusak		
	149	Tempat Tidur Kayu	3 Unit	Baik		
	150	Termos A.J	5 Unit	5 Unit Rusak		
	152	Timbangan	2 Unit	2 Unit Rusak		
	153	Timbangan Bayi	3 Unit	1 Unit Rusak	6 Unit	
	156	Tripod Camera	3 Unit	Baik		
	157	Tustel	2 Unit	Baik		
	158	USG	1 Unit	1 Unit Rusak	1 Unit	
	159	Vacum Pump	30 Unit	30 Unit Rusak		
	160	Water Filter	1 Unit	Baik		
	161	Water Quality Analyzer System (Tester Kit)	3 Unit	Baik		
	163	White Board	9 Unit	Baik		

1.7 Sistematika LAKIP

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Tujuan penyusunan LAKIP;
2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan realisasi keuangan;
3. Sasaran strategis dan program Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi pada Tahun 2023.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang Penjelasan Umum Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi yang terdiri dari Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Organisasi, isu strategis, keadaan Sumber Daya (keadaan pegawai, keadaan sarana dan prasarana, keuangan) dan sistematika penulisan LAKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai Perencanaan Strategis (Visi dan Misi), Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, Strategi, Program dan Kegiatan, Perjanjian Kinerja, Rencana Anggaran (Target Belanja Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan tentang capaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi antara lain: Capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau yang sejenis, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dukungan inovasi dalam pencapaian kinerja, kolaborasi lintas sektor yang mendukung pencapaian kinerja dan peran OPD dalam pencapaian sasaran, dan Realisasi Anggaran yang dipergunakan untuk mencapai kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi, rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kinerjanya dan pemanfaatan laporan kinerja oleh pimpinan Perangkat Daerah sebagai feedback dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.

LAMPIRAN

Pada bagian ini disajikan bagan struktur organisasi, cascading/pohon kinerja, perjanjian kinerja dan perubahan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, foto-foto penghargaan yang diperoleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan yang baik berdampak pada keberhasilan kinerja Perangkat Daerah, oleh karenanya perlu adanya perencanaan strategis yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan Strategis merupakan sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada 5 tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahunnya untuk mencapai tujuan 5 tahunan. Oleh Karena itu perencanaan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) tahunan merupakan turunan dari tahapan renstra per tahun. Maka penyusunan Rencana Kerja Tahunan tidak boleh lepas dari Renstra yang telah disusun sebelumnya.

Dokumen Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2023-2026 adalah turunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS).

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode tahun 2023-2026 merupakan pembangunan tahap ke empat dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025, yang mana dalam kurun waktu tersebut akan dilakukan pencapaian masyarakat yang maju, mandiri dan berkeadilan yang diantaranya ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas dan manajemen SDM yang unggul, semakin berkurangnya ketergantungan pada pihak di luar Kota Cimahi serta pelaksanaan pembangunan yang semakin adil.

Visi Misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir cascade RPD Kota Cimahi Tahun 2023- 2026 adalah sebagai berikut,

Tabel 2.1
Ringkasan Visi Misi RPD Kota Cimahi 2023 - 2026

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Cimahi Kota Cerdas	1. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
			Meningkatnya pengarusutamaan gender
			Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak
			Pengendalian penduduk yang sesuai dengan daya tampung kota
		Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
			Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan
			Meningkatnya Pemberdayaan Pelaku kebudayaan
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
	2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya keswadayaan Masyarakat
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
			Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah
			Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah
			Optimalisasi Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah
	3. Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah
			Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan
			Meningkatnya kesempatan kerja
	4. Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah
	5. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan	Berkurangnya luasan banjir
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan
			Meningkatnya Kualitas Permukiman
			Meningkatnya pelayanan transportasi yang terpadu dan berkualitas

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
			Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
			Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang di Kota Cimahi
			Terwujudnya Kualitas Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik
		Meningkatkan Ketahanan Bencana	Meningkatnya Ketahanan Bencana

Sumber : RPD Kota Cimahi Tahun 2023 - 2026

Berdasarkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah, serta tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi mendukung pada pencapaian : (1) Misi ke 2 yaitu : “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”, (2) Misi ke-3 yaitu : “Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah” dan (3) Misi Ke 4 yaitu : “Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan”, yang diukur dengan indikator sasaran : (1) Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik, (2) Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan dan (3) Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Jangka menengah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi selama 4 tahun (2023 – 2026) adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi dan Menurunnya Angka Kemiskinan. Indikator sasaran strategis yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas

Pangan dan Pertanian di Tahun 2023 merupakan turunan dari indikator sasaran RPD 2023 – 2026 Kota Cimahi yang kemudian akan menaungi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. IKU 2023 Dinas Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sasaran Strategis (IKU) Dispangtan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	1. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian	30 Nilai
2	Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan	2. Nilai PPH Ketersedian	2350 Nilai
		3. Skor PPH Ketersedian	67,9 Nilai
		4. Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian	1,32 persen
3	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	5. Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan	100 persen

1.1.3 Sasaran strategis, Program dan Kegiatan

Dalam upaya pencapaian target kinerja di Tahun 2023, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi didukung oleh 10 program dan 22 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut tercantum pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

2.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi

amanah). Tujuan perjanjian kinerja yaitu mendorong komitmen penerima amanah dalam melaksanakan amanah yang diterimanya dan diharapkan terus meningkatkan kinerjanya. Perjanjian kinerja juga berfungsi menciptakan tolok ukur kinerja yakni sebagai alat untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan serta sasaran organisasi.

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi merupakan janji Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi kepada Kepala Daerah/Wali Kota Cimahi untuk melaksanakan program dan kegiatan beserta indikator dan targetnya sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Terjadinya pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran;
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja tahun 2023 (murni dan perubahan) telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perubahan Dinas Pangan dan Pertanian 2023-2026. Perjanjian Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian tahun 2023 adalah sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	1. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian	30 Nilai
2	Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan	2. Nilai PPH Ketersedian	2350 Nilai
		3. Skor PPH Ketersedian	67,9 Nilai
		4. Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian	1,32 persen
3	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	5. Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan	100 persen

2.3 Rencana Anggaran Perubahan Dispangtan Kota Cimahi Tahun 2023

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi dalam melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 13.108.848.000,- ,kemudian dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat perubahan kebijakan dari instansi vertikal dan kebijakan Kepala Daerah berupa kebijakan terkait dukungan penanganan inflasi daerah, sehingga diperlukan penyesuaian penganggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui mekanisme APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2023, anggaran Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi mengalami perubahan menjadi Rp. 13.228.060.618,-.

2.3.1 Target Belanja Dispangtan Kota Cimahi

Target belanja merupakan angka (jumlah) belanja yang direncanakan dan harus tercapai. Target belanja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi di tunjukan pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Target Belanja APBD-P Dispangtan Kota Cimahi Tahun 2023

URAIAN	Target	Prosentase
BELANJA OPERASI	Rp12.961.811.000	99,87%
Belanja Pegawai	Rp8.480.443.675	
Belanja Barang dan Jasa	Rp4.481.367.325	
BELANJA MODAL	Rp147.037.000	1,21%
Belanja modal peralatan dan mesin	Rp60.682.000	
Belanja modal aset tetap lainnya	Rp86.355.000	
Jumlah Belanja	Rp13.108.848.000	100%

2.3.2 Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

Anggaran belanja Tahun 2023 Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 2.6
Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Anggaran Perubahan (Rp).	%	Keterangan
1.	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	1. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian	Rp. 9.998.410.292	75,58	Sebesar 75,58% dibandingkan dengan total belanja Dispangtan
2.	Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan	2. Nilai PPH Ketersedian	Rp. 3.075.630.226	23,25	Sebesar 23,25% dibandingkan dengan total belanja Dispangtan
		3. Skor PPH Ketersedian			
		4. Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian			

No.	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Anggaran Perubahan (Rp).	%	Keterangan
3.	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	5. Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan	Rp. 154.020.100	1,16	Sebesar 1,16% dibandingkan dengan total belanja Dispangtan

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Capaian kinerja merupakan hasil capaian yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan yang mencakup indikator kinerja, target dan realisasi kinerja, serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan dengan menggunakan tabel pengukuran kinerja, yang selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan dari kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023 yang merupakan periode awal tahun pertama Renstra 2023 – 2026, Dinas Pangan dan Kota Cimahi memiliki 3 (tiga) sasaran strategis untuk 3 (tiga) urusan yaitu urusan pangan, pertanian dan perikanan dan kelautan, dan terdapat 5 (lima) indikator kinerja utama (IKU), metode pengukuran/formulasi yang digunakan untuk menghitung pencapaian kinerja IKU TA. 2023 seperti tampak pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran/fomulasi capaian IKU Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi TA. 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	1. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP pertahun dengan komponen pengungkit 60%	Dispangtan, APIP

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
		dan hasil 40%	
Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan	2. Nilai PPH Ketersedian	Hasil kalkulasi data aplikasi Harmonisasi analisis nilai PPH (Susenas), hasil inputing data konsumsi masyarakat Cimahi per kapita per minggu selama satu tahun.	Organisasi - Setda
	3. Skor PPH Ketersedian	Hasil kalkulasi data aplikasi Harmonisasi analisis nilai PPH (Susenas), hasil inputing data konsumsi masyarakat Cimahi per kapita per minggu selama satu tahun.	Dispangtan
	4. Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian	Hasil perhitungan dan publikasi BPS	KCDA, BPS
Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	5. Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan	Perbandingan antara target dan realisasi pelaksanaan penanaman intervensi rawan pangan.	Dispangtan

Adapun target dan realisasi capaian IKU TA. 2023 terlihat pada tabel 3.2 berikut:

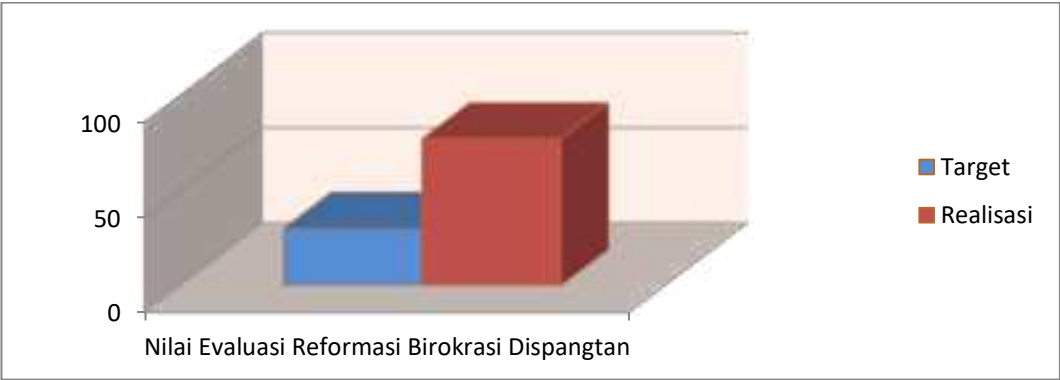
Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	1. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian (Nilai)	30	77,05	256
2	Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan	2. Nilai PPH Ketersedian (Nilai)	2350	2183	92,89
		3. Skor PPH Ketersedian (Nilai)	67,9	89,6	131,95
		4. Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian (Persen)	1,32	1,55	117,42
3	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	5. Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan (Persen)	100	100	100

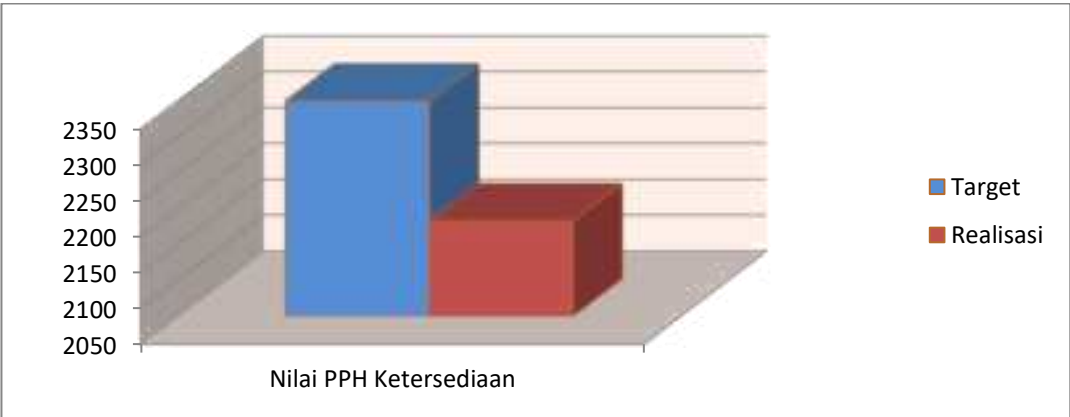
Pada tahun 2023 di ranah pencapaian kinerja eselon II, dari 3 (tiga) sasaran strategis terdapat 3 (tiga) indikator yang tercapai melebihi target yang ditentukan yaitu (1) Nilai evaluasi reformasi birokrasi Dispangtan tercapai sebesar 256,8%, (2) Skor PPH ketersediaan tercapai sebesar 131,95% dan persentase peningkatan nilai PDRB sektor pertanian sebesar 117,42%, terdapat 1 (satu) indikator yang capaiannya hampir mendekati target yaitu Nilai PPH ketersediaan diperoleh capaian sebesar 92,89%, terdapat 1 (satu) indikator yang hasil capaiannya sudah sesuai yaitu indikator

cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawan pangan sebesar 100%.

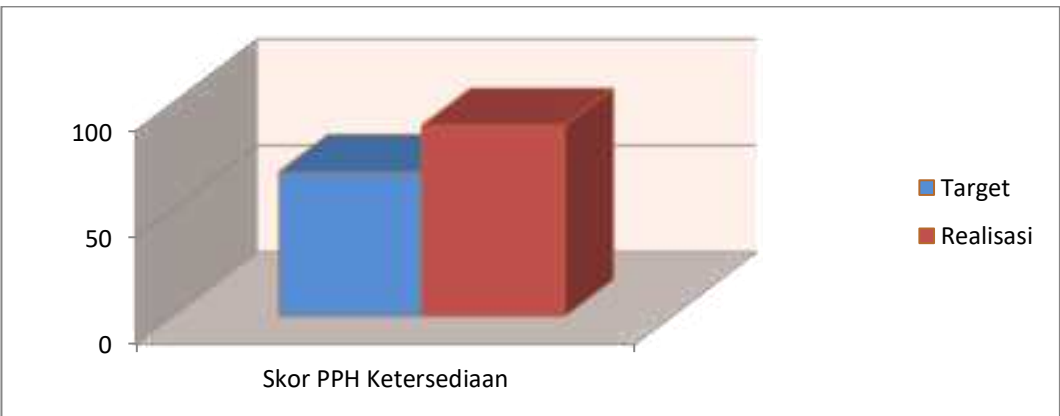
Masing-masing capaian kinerja sasaran strategis di atas dapat digambarkan pencapaiannya dengan grafik sebagai berikut:



Gambar 3.1 Target dan realisasi indikator kinerja sasaran strategis 1



Gambar 3.2 Target dan realisasi indikator kinerja sasaran strategis 2.1



Gambar 3.3 Target dan realisasi indikator kinerja sasaran strategis 2.2



Gambar 3.4 Target dan realisasi indikator kinerja sasaran strategis 2.3



Gambar 3.5 Target dan realisasi indikator kinerja sasaran strategis 3

3.2 Analisis dan Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Dikarenakan tahun 2023 merupakan awal tahun pertama periode Renstra Dispangtan 2023-2026 maka akan disajikan perbandingan perubahan indikator yang merupakan penyesuaian indikator turunan dari RPD Kota Cimahi Tahun 2023 – 2026. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Perbandingan indikator kinerja Tahun Dinas Pangan dan Pertanian dengan periode tahun-tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra tampak pada Tabel 3.3 (periode RPJMD 2017-2022) berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan indikator dan capaian sasaran strategis Dispangtan Tahun 2017 - 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi							Target Renstra Tahun 2022	Capaian Tahun 2022 terhadap Target Renstra Tahun 2022 (%)
				Kondisi kinerja awal (2016)	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	Meningkatkan Kuantitas ketersediaan dan konsumsi pangan	Presentase tingkat capaian ketersediaan energy dan protein perkapita terhadap standard ideal	%	N/A	Energy : 114,1 % Protein : 89,6 %	Energy: 91,9 % Protein: 145,1%	Energy: 97,6 % Protein: 207,3%	Energy: 97,6 % Protein: 207,3%	-	-	Energy : 100 Protein : 100	Energy: 97,6 % Protein: 207,3 %
		Presentase tingkat capaian konsumsi energy dan protein perkapita terhadap standard ideal	%	N/A	Energy 97,6% Protein : 107,8 %	Energy: 91,5 % Protein: 104 %	Energy: 98,8 % Protein: 109,0 %	Energy: 97,93 % Protein: 109,47 %	-	-	Energy : 100 Protein : 100	Energy: 97,93 % Protein: 109,47%
		Nilai/skor PPH Ketersediaan	Nilai /Skor	N/A	-	-	-	-	94,4	90,6	94	96,38
2	Meningkatkan produksi/produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan	Prosentase peningkatan produktivitas hasil tanaman padi	%	0	0	2,62	2,62	-1,49	4,6	1,53	1,54	99,35
		Prosentase peningkatan produksi susu	%	N/A	0	9,73	1,04	49,94	4	1,43	26,67	5,36
		Prosentase peningkatan produksi ikan budidaya	%	N/A	0	9,5	11,78	-19,94	3,35	2,5	5	50,00
		Prosentase rata-rata peningkatan PAD dari sektor perikanan dan pertanian	%	N/A	-	43,96	32,43	-18,82	10,5	9,4	7,5	125,33

Sedangkan capaian kinerja pada tahun pertama periode Renstra 2023 – 2026 tampak pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan indikator dan capaian sasaran strategis Dispangtan Tahun 2023 - 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya (2021)	2023		% Capaian	Target (2026)	Capaian Tahun 2023 terhadap Target Renstra Tahun 2026 (%)
				Target	Realisasi			
1	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian	22,79	30	77,05	256,8	40	192,62
2	Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan	Nilai PPH Ketersediaan	2136	2350	2183	92,89	2380	91,72
		Skor PPH Ketersediaan	90,4	67,9	89,6	131,95	68	131,76
		Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian (Persen	-2,90	1,32	1,55	117,42	1,33	116,54
3	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan	100	100	100	100	100	100

Tingkat capaian sasaran strategis ke 1 yang di ukur dari indikator Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian, jika dibandingkan dengan tingkat capaian sasaran tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 54,26 (nilai), dan tercapai 192,62% dari target akhir sasaran Renstra di tahun 2026.

Tingkat capain sasaran strategis ke 2 (dua) indikator ke 1 (satu) yaitu Nilai PPH Ketersediaan, mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 0,1% dan tercapai 91,72% dari target akhir sasaran Renstra di Tahun 2026. Capaian indikator ke 2 (dua) yaitu Skor PPH Ketersediaan, mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 2,57% dan tercapai 131.76% dari target akhir sasaran renstra yang harus tercapai di tahun 2026. Capaian indikator ke 3

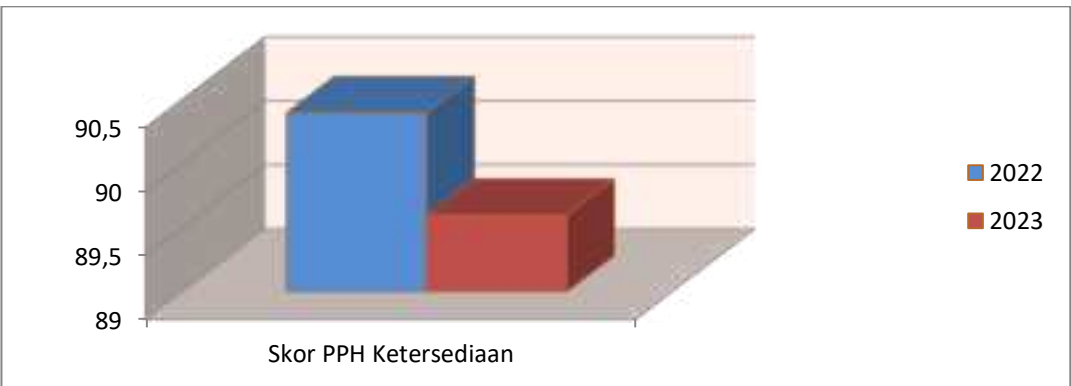
(tiga) yaitu Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian mengalami kenaikan sebesar 0,85% dari tahun 2022 dan tercapai 116,54% dari target akhir sasaran renstra yang harus tercapai di tahun 2026.

Tingkat capaian sasaran strategis ke 3 (tiga) yang diukur oleh indikator Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan tercapai 100% dan dan sudah terlaksana 25% dari target akhir sasaran renstra yang harus tercapai di tahun 2026.

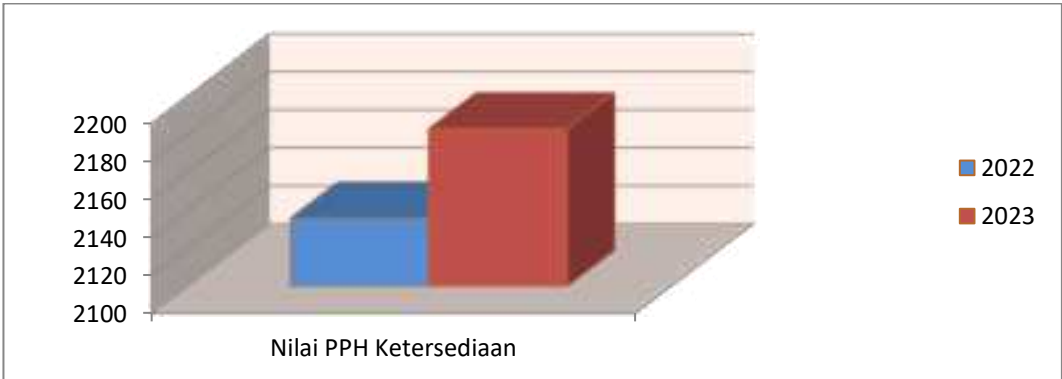
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap tahun sebelumnya ditunjukkan pada grafik berikut :



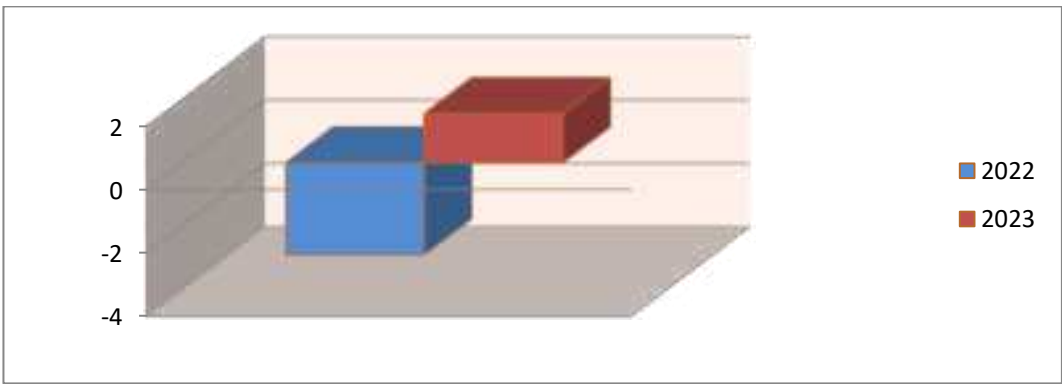
Gambar 3.6 Perbandingan capaian indikator nilai evaluasi reformasi birokrasi dengan capaian tahun sebelumnya



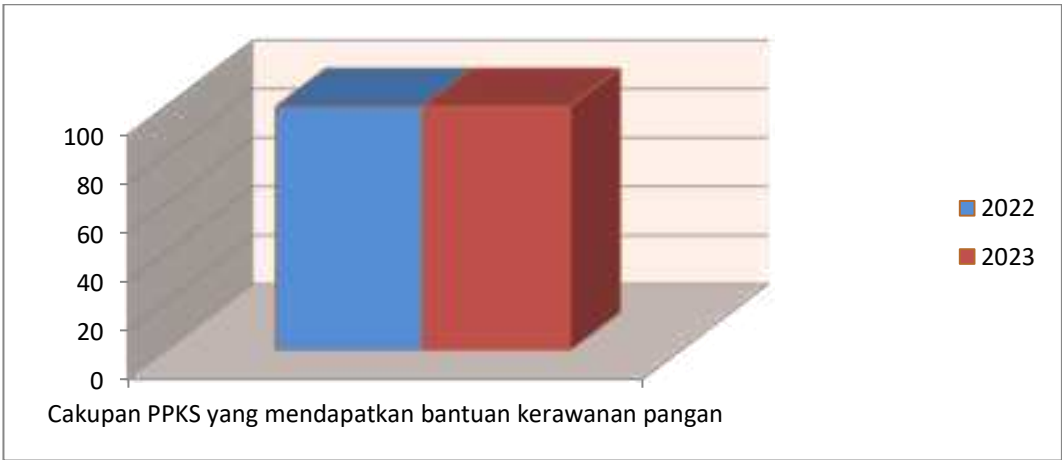
Gambar 3.7 Perbandingan capaian indikator nilai PPH Ketersediaan dengan capaian tahun sebelumnya



Gambar 3.8 Perbandingan capaian indikator Nilai PPH Ketersediaan dengan capaian tahun sebelumnya



Gambar 3.9 Perbandingan capaian indikator Nilai PDRB Sektor Pertanian



Gambar 3.10 Perbandingan capaian indikator cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan dengan capaian tahun sebelumnya

3.3 Analisis Capaian Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2023

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran strategis 1 Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian	Nilai	30	77,05	256,8

Inovasi pelayanan publik diperlukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah titik terpenting untuk memenuhi harapan masyarakat. Sementara pelayanan publik yang diberikan Pemerintah masih belum seimbang dengan pelayanan pihak swasta. Inilah yang menjadi dasar supaya pelayanan yang diberikan pemerintah sama dengan yang diberikan pihak swasta.

Setiap instansi dituntut untuk melaksanakan **kebijakan nasional** terkait percepatan program Reformasi Birokrasi dengan menetapkan 9 (Sembilan) program percepatan reformasi birokrasi yaitu :

1. Penataan struktur birokrasi;
2. Penataan jumlah, kualitas dan distribusi PNS;
3. Sistem seleksi dan promosi secara terbuka;
4. Profesional PNS;
5. Pengembangan system elektronik pemerintah (e-government);
6. Penyederhanaan perizinan usaha;
7. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur;
8. Peningkatan kesejahteraan PNS;
9. Efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja PNS.

Program ini secara dominan ditujukan pada pengelolaan sumber daya aparatur, yakni pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini dikarenakan PNS merupakan penggerak administrasi negara yang bersentuhan langsung dengan masyarakat saat memberikan layanan publik. Selain itu, umumnya, pembiayaan aparatur masih menjadi pos terbesar dalam alokasi anggaran berbagai intitusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sasaran Strategis 2 : Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan

Tabel 3.5
Tabel capaian strategis ke 2 Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai PPH Ketersediaan	Nilai	2350	2183	92,89
2	Skor PPH Ketersediaan	Skor	67,9	89,6	131,95
3	Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian (Persen	Persen	1,32	1,55	117,42

Pemerataan pendapatan adalah dimana kondisi tingkat pendapatan antar individu tidak terjadi ketimpangan. Gini ratio digunakan menjadi salah satu indikator dalam menggambarkan tingkat ketimpangan di Indonesia. Pada dasarnya pemerataan pendapatan merupakan inti dari tujuan pembangunan, karena sampai sekarang menjadi topik yang menarik untuk dikaji. Ketimpangan pendapatan menunjukkan distribusi pendapatan yang tidak merata diseluruh wilayah yang merupakan dampak awal dari pembangunan yang terjadi. Hariani (2019) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan bisa disebabkan oleh tidak meratanya pembangunan antar daerah dan juga bisa disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia, potensi sumber daya alam dan kondisi geografis. Ketimpangan pendapatan juga didorong oleh kemampuan modal manusia, diskriminasi, kekuatan pasar dan keberuntungan serta koneksi. Rendahnya ketimpangan atau pemerataan pendapatan tentunya menjadi salah satu agenda terpenting dalam pembangunan ekonomi.

Pemerataan pendapatan merupakan permasalahan dalam pembangunan yang dilakukan secara tata ruang. Untuk mencapai pembangunan yang merata dalam wilayah suatu negara masyarakat diperlukan kerjasama dan dukungan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Pemerataan pendapatan dapat dilihat dari distibusi pendapatan yang proposional dari pendapatan nasional total diantara berbagai rumah tangga dalam negara. Ketidakmerataan pendapatan dapat disebabkan oleh tidak

meratanya pembangunan antar daerah dan juga bisa disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia, potensi sumber daya alam dan kondisi geografis.

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk berkontribusi dalam rangka mempercepat pemerataan pendapatan di Kota Cimahi dengan berfokus terutama di bidang pangan, pertanian dan perikanan.

Kuantitas ketersediaan pangan dapat digunakan sebagai indikator untuk menganalisis kemandirian pangan sebuah daerah (Kabupaten/Kota). Kemandirian pangan adalah kemampuan wilayah dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Kemandirian pangan suatu daerah dapat dianalisis dengan menggunakan indikator kuantitatif dan kualitatif. Indikator kuantitatif yang digunakan adalah tingkat kecukupan energy dan protein, sedangkan indikator kualitatif atau keragaman pangan yang tersedia adalah skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan.

Konsumsi Pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu, Konsumsi pangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu secara biologis, psikologis maupun social. Tingkat konsumsi ditentukan oleh kualitas dan kuantitas makanan yang dimakan. Kualitas makanan menunjukkan adanya zat gizi yang diperlukan tubuh di dalam susunan hidangan dan perbandingannya terhadap satu dan lainnya. Kuantitas menunjukkan jumlah masing-masing zat gizi terhadap kebutuhan tubuh. Tingkat konsumsi individu dapat mempengaruhi status gizinya.

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. PPH adalah komposisi pangan atau kelompok

pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif), yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragaman dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. Tujuan dari PPH adalah untuk menghasilkan suatu komposisi standar pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk yang mempertimbangkan cita rasa (palatability), daya cerna (digestibility), daya terima Masyarakat (acceptability), kuantitas dan kemampuan daya beli (affordability).

Status gizi yang baik yang ingin diwujudkan dalam pembangunan ketahanan pangan adalah kondisi kesehatan tubuh seseorang yang sehat dan berkualitas, yang merupakan hasil akhir dari asupan makanan ke dalam tubuh dan pemanfaatannya. Status gizi memiliki kaitan yang sangat erat dengan kemampuan menyediakan makanan di tingkat keluarga dan adanya penyakit terutama penyakit menular. Kedua faktor ini berhubungan dengan pendapatan, pelayanan kesehatan, pengetahuan dan pola asuh yang diterapkan keluarga.

Untuk tahun 2023 Sasaran Sinergis ini memiliki satu indikator yaitu :

1. Nilai atau skor PPH ketersediaan. Ketersediaan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan suatu wilayah. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan akan pangan dan gizi bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan. Dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan, diperlukan target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun. Widyakarya pangan dan gizi (WNPG) XI tahun 2018 merekomendasikan ketetapan tingkat ketersediaan pangan per kapita bagi setiap penduduk dalam suatu wilayah. Pada tingkat penyediaan energi sebesar 2.400 kkal/kapita/hari, sedangkan untuk protein sebesar 63 gram/kapita/hari.

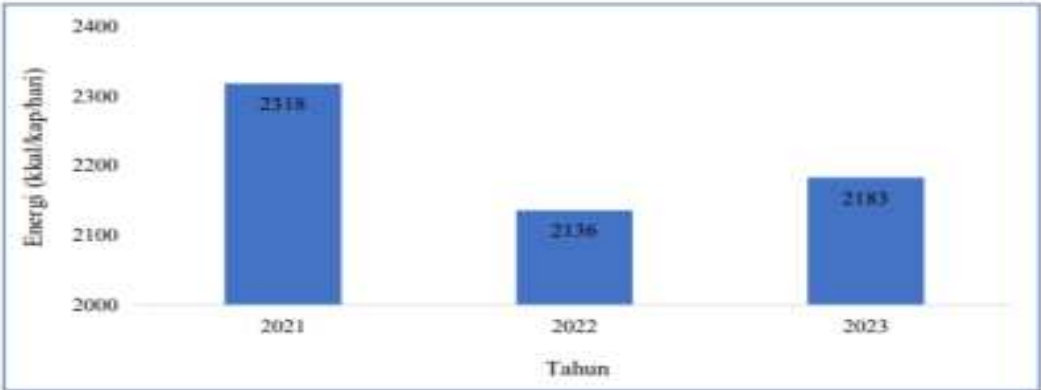
Ketersediaan energi di Kota Cimahi adalah sebesar 2.318 kkal/kapita/hari. Sebagian besar energi berasal dari pangan

nabati, yaitu 2.024 kkal/kapita/hari atau setara dengan 87,3%. Adapun ketersediaan energi dari pangan hewani sebesar 295 kkal/kapita/hari, sebanyak 69,7% berasal dari pangan nabati (47,3 gram/kapita/hari) dan 30,3% berasal dari pangan hewani (20,5 gram/kap/hari). Ketersediaan lemak di Kota Cimahi sebesar 49,2 gram/kapita/hari, sebanyak 60,6% berasal dari pangan nabati (29,8 gram/kapita/hari) dan 39,4% berasal dari pangan hewani (19,4 gram/kapita/hari). Ketersediaan masih dibawah standar 2.400 kkal/kapita/hari namun sudah dapat dikategorikan cukup karena lebih tinggi dari 90% AKE. Ketersediaan protein sudah melebihi standar 63 gram/kapita/hari, yaitu 107,7% AKP. Ketersediaan pangan yang berlebih adalah padi-padian (1.331 kkal/kapita/hari dari 1200 kkal/kapita/hari), pangan hewani (295 kkal/kapita/hari dari 240 kkal/kapita/hari), minyak dan lemak (336 kkal/kapita/hari dari 240 kkal/kapita/hari) dan sayur buah (157 kkal/kapita/hari) dari 144 kkal/kapita/hari)

Perkembangan ketersediaan pangan Kota Cimahi pada tahun 2023 tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Perkembangan Ketersediaan Pangan per Kapita untuk Konsumsi Penduduk

Kelompok Pangan	Gram/kap/hari		kkal/kap/hari	
	2022	2023	2022	2023
Padi-padian	351,6	371,7	1.237	1.303
Umbi-umbian	40,5	33,7	33	29
Pangan hewani	266,7	278,4	299	251
Minyak dan lemak	33,0	31,6	296	284
Buah/biji berminyak	1,9	0,6	3	1
Kacang-kacangan	19,0	21,8	72	83
Gula	16,4	14,6	60	53
Sayur dan buah	471,1	601,0	136	179
Total			2.136	2.183



Sumber : Kajian Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan Kota Cimahi Tahun 2023

Skor PPH ketersediaan menggambarkan keragaman ketersediaan pangan dan gizi di suatu wilayah. Tingkat keragaman ketersediaan pangan akan mendukung pencapaian keragaman konsumsi pangan (Atasa dan Nugroho, 2021). Perkembangan skor PPH Kota Cimahi tahun 2021-2022 mengalami penurunan 4 poin, kemudian menurun kembali tahun 2022-2023 sebesar 0,8 poin. Penurunan skor PPH pada tahun 2022-2023 dikarenakan total produksi pangan hewani yang bersumber dari daging ruminansia mengalami penurunan sebesar -1.871,9 ton. Selain itu, penyediaan dari impor mengalami penurunan pada umbi-umbian, telur, susu, kemiri (buah/biji berminyak), dan gula. Dari hasil analisis tersebut makaperlu upaya untuk meningkatkan keragaman ketersediaan pangan di Kota Cimahi. Padahal ketersediaan pangan Kota Cimahi hampir seluruhnya berasal dari pasokan wilayah lain. Ke depannya, pemantauan pasokan pangan dapat dilakukan oleh instansi terkait sejalan dengan strategi peningkatan ketersediaan pangan dengan **arah kebijakan**, yaitu :

1. Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan daerah dan peningkatan pengelolaan Cadangan pangan kabupaten/kota.
2. Peningkatan pengelolaan Cadangan pangan kabupaten/kota.

Strategi stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan arah kebijakan, yaitu :

1. Terjaminnya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kota;
2. Meningkatkan upaya pengendalian harga dan stok barang;
3. Kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Pasar Kota.

Strategi peningkatan sarana dan prasarana distribusi dan perdagangan dengan arah kebijakan, yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
2. Meningkatkan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya;
3. Ketiga strategi dan arah kebijakan diatas tercantum dalam Tujuan Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi pada Misi Ketiga Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya saing

serta Berbasis Inovasi Daerah pada Peraturan Walikota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi tahun 2023-2026Laju perkembangan ketersediaan energi tahun 2021-2022 yaitu -7,85%, sementara laju perkembangan ketersediaan energi tahun 2022-2023 adalah +2,15%. Peningkatan ketersediaan energi di Kota Cimahi pada tahun 2023 dimungkinkan karena penyediaan pangan sumber energi mengalami peningkatan, misalnya produksi padi-padian (+770,9 ton) maupun penyediaan pangan yang berasal dari impor, seperti peningkatan impor beras sebesar +3.999 ton.

Tabel 3.7 Situasi Ketersediaan Pangan Kota Cimahi Tahun 2023

Kelompok Pangan	Berat	Energi				Protein		Skor PPH	
	g/kap/hari	kkal/kap/hari	%AKE			g/kap/hari	%AKP		
	Aktual	Ideal	Aktual	Ideal	Aktual	Aktual	Aktual	Ideal	Aktual
Padi-padian	371,7	1.200	1.303	50,0	54,3	32,2	51,1	25,0	25,0
Umbi-umbian	33,7	144	29	6,0	1,2	0,0	0,5	2,5	0,6
Pangan Hewani	278,4	288	251	12,0	10,4	23,0	36,4	24,0	20,9
Minyak dan Lemak	31,6	240	284	10,0	11,8	0,0	0,0	5,0	5,0
Buah/Biji Berminyak	0,6	72	1	3,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Kacang-kacangan	21,8	120	83	5,0	3,5	8,5	13,6	10,0	6,9
Gula	14,6	120	53	5,0	2,2	0,0	0,0	2,5	1,1
Sayur dan Buah	601,0	144	176	6,0	7,5	4,1	6,5	30,0	30,0
Lain-lain	-	72	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total		2.400	2.183	100,0	91,0	68,2	108,2	100,0	89,6

Sumber : Kajian Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan Kota Cimahi Tahun 2023

Tingkat ketersediaan pangan selain dilihat berdasarkan kecukupan gizinya, baik energi dan protein, juga dinilai dari keragaman berdasarkan pola pangan harapan (PPH). PPH ketersediaan dihitung berdasarkan ketersediaan energi. Tingkat keragaman dan ketersediaan pangan akan mendukung pencapaian keragaman konsumsi pangan sehingga dapat dicapai sasaran konsumsi pangan yang diharapkan.

Skor PPH yang dicapai pada Tahun 2023 adalah 89,6. Angka ini selisih 10,4 poin dari skor PPH ideal, yaitu 100. Beberapa kelompok pangan masih belum memenuhi skor PPH ideal sehingga perlu untuk ditingkatkan penyediaannya, seperti umbi2 an (0,6 dari 2,5), pangan hewani (20,9 dari 24,0), buah/biji berminyak (0,0 dari 1,0), kacang-kacangan (6,9 dari 10,0) dan gula (1,1 dari 2,5). Sementara itu, kelompok padi-padian, minyak dan lemak serta sayur dan buah telah mencapai skor PPH Ideal.

Kendala :

Situasi ketersediaan setiap kelompok pangan di Kota Cimahi cenderung belum merata. Beberapa kelompok bahan makanan terjadi surplus/berlebih, namun ada juga yang masih defisit/kurang. Ketersediaan pangan yang surplus adalah kelompok padi-padian, lemak dan minyak, serta sayur dan buah. Sedangkan, kelompok pangan yang tersedia lebih rendah dari jumlah idealnya adalah umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, serta gula.

Solusi :

Untuk menjamin ketersediaan pangan di Kota Cimahi, berbagai upaya dilakukan diantaranya :

- ✓ terus mengupayakan untuk meningkatkan produksi dari sektor pertanian, melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
- ✓ Menjamin kelancaran distribusi dan rantai pasokan dengan membentuk Toko Tani Indonesia Center (TTIC)/ Bazaar pangan murah sehingga masyarakat bisa mengakses aneka macam jenis bahan pangan pokok yang dibutuhkan.
- ✓ Pemantauan harga untuk stabilisasi harga pangan di pasaran.

Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Untuk berkontribusi pada persentase peningkatan nilai PDRB sektor Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi berusaha meningkatkan produktivitas pertanian, produksi perikanan, pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian, pemberian penyuluhan pertanian, meningkatkan izin usaha pertanian dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Produktivitas padi adalah jumlah produksi hasil tanaman padi dibagi dengan luas lahan yang ditanami. Peningkatan persentase produktivitas hasil tanaman padi dihitung berdasarkan peningkatan produktivitas hasil tanaman padi pada tahun 2023 terhadap produktivitas hasil tanaman padi pada awal Rencana Strategis, yaitu Tahun 2017. Penurunan produktivitas hasil tanaman padi di tahun 2022 ini tidak lepas dari dampak semakin tingginya penurunan alih fungsi lahan pertanian akan tetapi strategi yang dilakukan untuk tetap mempertahankan produktivitas pada lahan yang masih ada yaitu dengan melakukan upaya Sistem Budidaya Pengelolaan Tanaman Terpadu yang mencakup penerapan teknologi budidaya tanam padi, misalnya dengan sistem jajar legowo, penggunaan varietas unggul baru (VUB), penggunaan bibit muda yaitu usia tanam tidak lebih dari 3 (tiga) minggu, penerapan pupuk berimbang dan Pengendalian Hama terpadu, dan penanganan pasca panen yang tepat.

Agar dapat mengatasi krisis pangan di Indonesia, diperlukan pendekatan yang bersifat holistik dan kolaboratif. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

1. Peningkatan inovasi dan dukungan pembiayaan dalam sektor pertanian dengan memberikan akses yang lebih mudah bagi petani terhadap modal, teknologi pertanian, dan pelatihan.
2. Peningkatan ketahanan pangan melalui diversifikasi usaha pertanian, pengembangan sistem irigasi, dan pemanfaatan lahan yang tepat.
3. Peningkatan akses pasar bagi petani dan pembukaan pasar baru untuk produk pertanian Indonesia.

4. Peningkatan kebijakan dan regulasi yang mendukung sektor pertanian, seperti peningkatan kualitas benih, perlindungan tanaman, dan insentif bagi petani yang berinovasi.

Kendala :

Luas lahan pertanian di Kota Cimahi terus mengalami pengurangan akibat alih fungsi lahan yang terus terjadi. Berdasarkan data dari badan Pusat Statistik (BPS). Lahan sawah Kota cimahi tahun 2023 adalah 137,14 Ha. Berkurangnya luas lahan pesawahan ini berdampak kepada produksi dan produktivitas hasil tanaman padi.

Solusi :

Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil tanaman padi, diupayakan hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan LP2B (Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan) seluas 15,35 Ha;
2. Intensifikasi pertanian (pengolahan tanah yang baik, penggunaan varietas unggul baru, pemupukan yang berimbang, pengairan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman;
3. Penerapan teknologi tepat guna (Biogro, vertikultur, hidroponik, hidroponik, tabulapot, padi polybag;
4. Uji varietas tanaman.
5. Meningkatkan inovasi di bidang pertanian, perikanan dan peternakan untuk memudahkan pencapaian target program dan kegiatan.

Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan	Persen	100	100	100

Tabel 3.8 Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan

Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dalam meningkatkan pemanfaatan pangan. Terkait keamanan pangan, peraturan yang ada terkait keamanan pangan perlu diperbarui. Kapasitas organisasi pemantau dan pendidikan keamanan pangan untuk masyarakat juga perlu ditingkatkan. Untuk meningkatkan keanekaragaman pangan, perumusan skor Pola Pangan Harapan (PPH) perlu diperbaiki agar dapat menyasar proporsi asupan karbohidrat yang lebih rendah dan proporsi asupan buah-buahan dan sayuran yang lebih tinggi sesuai dengan panduan gizi seimbang yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Terkait upaya untuk meningkatkan gizi, meski telah dilakukan beberapa hal penting untuk meningkatkan intervensi gizi sensitif dan gizi spesifik, efektivitas upaya-upaya tersebut perlu ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan semua pemangku kepentingan di semua tingkat pemerintahan serta membuatnya lebih menyeluruh dan terpadu. Selain itu, pemerintah perlu pula memberikan perhatian lebih pada ketersediaan data defisiensi mikronutrien yang dapat dijadikan sebagai dasar pijakan dalam mengatasi semua aspek dari tiga beban malnutrisi, seperti melalui fortifikasi pangan.

Pada 2020, tantangan untuk menangani kerawanan pangan dan malnutrisi menjadi makin besar akibat pandemi COVID-19. Badan Pusat Statistik (2020) menunjukkan bahwa akibat kontraksi ekonomi sebesar 2,4% (perbandingan antarkuartal) yang dialami Indonesia pada kuartal pertama 2020, sekitar 1,6 juta penduduk jatuh ke dalam kemiskinan antara September 2019 dan Maret 2020 (Badan Pusat Statistik, 2020d; 2020e). Pemerintah berupaya menangani hal ini dengan memperluas cakupan program perlindungan sosial. Namun, persoalannya adalah kurang mutakhirnya basis data rumah tangga penerima sehingga menimbulkan risiko kegagalan untuk menyasar kelompok-kelompok paling rentan, seperti rumah tangga berkepala keluarga perempuan dan penyandang disabilitas. Karena pandemi COVID-19 juga telah memengaruhi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kesehatan dan gizi, diperlukan tindakan-

tindakan darurat guna memastikan keberlangsungan layanan-layanan tersebut.

Berdasarkan analisis tersebut, laporan ini mengajukan beberapa saran kepada pembuat kebijakan untuk mengatasi dampak COVID-19 terhadap ketahanan pangan dan gizi. Penanggulangan dampak COVID-19 mengharuskan pemerintah untuk mengutamakan perspektif jangka pendek guna memastikan agar pandemi tidak mengikis kemajuan yang telah dicapai selama ini dalam ketahanan pangan dan gizi dan memastikan Indonesia dapat melanjutkan upaya untuk mencapai TPB/SDG 2 pada 2030. Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi harus memperhatikan hal-hal terkait kebijakan pusat tentang penanganan kerawanan pangan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. **Ketersediaan pangan:** Pemerintah perlu memantau stok beras secara ketat dan menempuh kebijakan perdagangan fleksibel yang memungkinkan pemerintah untuk melakukan penyesuaian impor pada saat dibutuhkan. Pemerintah juga harus mempertahankan insentif petani demi menjaga produksi pangan dengan menjamin ketersediaan input produksi, kelonggaran waktu untuk pelunasan pinjaman, dan akses ke pasar. Peningkatan dalam bidang transportasi dan sistem rantai pasokan juga diperlukan untuk memastikan komoditas pangan tetap tersedia di pasaran dengan harga yang tidak naik.
2. **Akses pangan:** Pemerintah perlu terus memastikan bahwa semua rumah tangga miskin dan rentan mendapatkan bantuan sosial untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap ketahanan pangan dan gizi. Upaya untuk memperluas cakupan program perlindungan sosial perlu melibatkan pemerintah daerah dan lembaga nirlaba atau organisasi masyarakat.
3. **Pemanfaatan pangan:** Pemerintah perlu memastikan bahwa anak-anak serta ibu hamil dan ibu menyusui dapat mengakses kembali layanan kesehatan, khususnya di pos pelayanan terpadu (posyandu) dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang ditutup dalam beberapa bulan terakhir

karena dampak COVID-19–tanpa mengorbankan keselamatan tenaga kesehatan atau pasien yang sehat.

4. **Gizi:** Untuk mencegah meningkatnya prevalensi wasting dan stunting selama krisis yang ditimbulkan pandemi COVID-19, pemerintah perlu memperluas penyediaan makanan tambahan, seperti biskuit fortifikasi, untuk membantu anak-anak serta ibu hamil dan ibu menyusui dari kelompok miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan gizi mereka.

Kendala :

- Masih tingginya kasus kerawanan pangan di Kota Cimahi;
- Ketidakakuratan data Masyarakat yang terkena dampak kerawanan pangan;
- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang dan pola makan yang sehat;

Solusi :

- Memberikan sosialisasi akan pentingnya gizi seimbang dan pola makan yang sehat melalui kampanye edukasi dan sosialisasi.
- Melaksanakan intervensi kerawanan pangan terutama bagi anak-anak yang terkena stunting.

3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber daya dapat dilihat berdasarkan capaian kinerja Sasaran Strategis pada Tabel berikut :

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian (Nilai)	256%	95%	161%
2	Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan	Nilai PPH Ketersedian (Nilai)	92,89%	89,05%	-
		Skor PPH Ketersedian	131,95%	89,05%	42,9%

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	Penyerapan Anggaran	Efisiensi
		(Nilai)			
		Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian (Persen)	117,42%	99,83%	17,59%
3	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan (Persen)	100%	78,25%	21,75%

Berdasarkan tabel 3.9 di atas tampak bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator kinerja berikut :

1. Nilai Reformasi birokrasi Dispangtan 161%;
2. Skor PPH Ketersediaan sebesar 42,9%;
3. Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian sebesar 17,59 %; dan
4. Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan sebesar 21,75 %.

3.5 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis tampak pada tabel be

Tabel 3.10
Realisasi fisik dan anggaran Dispangtan Tahun 2023

NO	BIDANG/KUA SA PENGGUNA ANGGARAN	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (RP)	Keu %	Fisik %
1	BIDANG KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN				

NO	BIDANG/KUA SA PENGGUNA ANGGARAN	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI (RP)	Keu %	Fisik %
		MASYARAKAT					
	Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca bahan makanan	45.173.400	43.777.600	96,91	99,91
		2	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	54.749.400	51.239.900	94	97
		3	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	53.944.750	40.049.962	74	100
		4	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	209.822.410	192.100.390	92	95
	Seksi Penganekaraga man Konsumsi dan Keamanan Pangan	5	Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	39.484.000	39.418.000	100	100
		6	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaraga man konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	375.464.018	347.776.155	93	96
2		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
	Seksi Ketersediaan dan Kerawanan	1	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan	10.000.050	4.881.750	48,82	51

NO	BIDANG/KUASA PENGGUNA ANGGARAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI (RP)	Keu %	Fisik %
	Pangan		kerawanan pangan kabupaten/kota				
		2	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	120.000.150	108.092.500	90.08	93
		3	Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	24.019.900	9.103.500	38	42
3		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
	Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	1	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	28.743.800	27.690.100	96	100
		2	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah/ kabupaten kota	50.000.000	48.105.400	96	100
			Urusan Pangan	1.011.401.878	912.235.257	90,2	93

NO	BIDANG/KUA SA PENGGUNA ANGGARAN	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI (RP)	Keu %	Fisik %
4	BIDANG PERTANIAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
	Seksi Pertanian	1	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	78.310.700	72.947.400	93	100
		2	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	331.798.700	308.305.596	93	100
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					
		1	Penilaian Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Udahnya dalam daerah Kabupaten/Kota	9.382.600	Rp9.132.600	97	100
5	BIDANG PERTANIAN DAN PERIKANAN, UPTD PUSKESWAN DAN UPTD BBIAT	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
	Seksi Pertanian	1	Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/L P2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/K P2B dan lahan	49.043.850	36.993.850	75	78

NO	BIDANG/KUASA PENGGUNA ANGGARAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI (RP)	Keu %	Fisik %
			cadangan pertanian pangan berkelanjutan/L CPB2B				
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
	Seksi Peternakan	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	126.557.444	105.440.610	83	86
		2	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	51.809.000	43.256.900	83	86
	UPTD. PUSKESWAN	3	Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner	777.704.534	603.758.782	78	81
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
	UPTD. BBIAT	1	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	570.705.170	543.812.528	95	98
	Seksi Perikanan	2	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan	87.633.400	87.577.400	100	100

NO	BIDANG/KUASA PENGGUNA ANGGARAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI (RP)	Keu %	Fisik %
			Informasi, serta Penyelenggaraa n Pendidikan dan Pelatihan				
		3	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	4.999.750	4.894.800	98	100
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
	Seksi Perikanan	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	130.303.300	126.654.902	97	100
			Jumlah	793.641.620	762.939.630	96,13	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Sub bag program dan keuangan	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.439.550	29.639.550	97	100
		2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.703.200	7.692.850	100	100
		3	Koordinasi dan	24.398.050	23.424.540	96	100

NO	BIDANG/KUASA PENGGUNA ANGGARAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI (RP)	Keu %	Fisik %
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
		4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.254.550	26.704.550	95	100
		5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.631.579.113	8.166.309.940	94,61	98
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60.916.000	60.916.000	100	100
		2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.561.000	6.558.100	100	100
		3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.558.400	92.648.400	97	100
		4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.393.400	32.384.200	100	100
		5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.264.050	15.262.350	100	100
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	182.088.000	178.803.766	98	100
		7	Dukungan Pelaksanaan	31.488.000	26.446.100	84	100

NO	BIDANG/KUA SA PENGGUNA ANGGARAN	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI (RP)	Keu %	Fisik %
			Sistem Peerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				
		8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	223.846.186	221.474.330	99	100
		9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000	100	100
		10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.287.629	72.014.821	91	100
		11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	321.240.984	312.196.855	97	100
		12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	191.702.180	185.811.850	97	100
		13	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.490.000	9.490.000	100	100
Jumlah				9.998.410.292	9.488.108.202	95	98
JUMLAH BELANJA LANGSUNG				13.228.060.618	12.343.118.827	93,31	96

Berdasarkan tabel 3.10 di atas, serapan anggaran belanja langsung untuk mendukung kegiatan sebesar 93,31%. Dengan demikian terjadi efisiensi anggaran dan pengembalian anggaran ke kas daerah sebesar 6,69%.

3.6. Kolaborasi lintas sektor

Dalam rangka pencapaian program dan kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada kerjasama dari berbagai pihak. Dalam mensukseskan program kegiatan yang akan dilaksanakan tidak terlepas dari konsep pentahelix yang merupakan gabungan dari 5 unsur. Unsur-unsur yang saling berkesinambungan dalam pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan. Kolaborasi yang telah dilaksanakan dari unsur Pemerintah, Akademisi, Komunitas bidang pertanian, perikanan dan peternakan, Pengusaha dan unsur lainnya.

Unsur-unsur kolaborasi yang mendukung Dinas Pangan dan Pertanian dalam pencapaian sasaran kinerja nya bisa digambarkan pada tabel (Cross Cutting) berikut ini :

Tabel 2.7
Cascading Keselarasan Renstra dan Cross Cutting Program Kegiatan 2023

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja Awal 2021	Target 2023	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal 2021	Target 2023	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Kinerja Awal 2021	Target 2023	Cross Cutting	
		Eselon II												Antar Bidang	Instansi Lainnya
		Eselon III													
1	2	3		4	5	6		7	8	9		10	11	12	13
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi	Indeks Gini	Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan	Nilai PPH Ketersediaan	2318	2350	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan energi (Kkal/kap/hari) dan Protein perkapita (gram/kap/hari)	1. 2.318 2. 67,8	1. 2.350 2. 67,9	1. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan darah kabupaten kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Jumlah dokumen analisis CV /koefisien varian bahan pangan pokok (dok)	12	12	Sekretariat dan bidang Pertanian dan Perikanan	Disdagkoperin, UPT. Pasar, Bulog, KWT, Pembudidaya
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)		Skor PPH Ketersediaan	67,8	67,9		Konsumsi energi perkapita (kkal/kap/hari) dan protein perkapita (gram/kap/hari)	1. 2.093,9 2. 61,9	1. 2.095 2. 62,5						

Tabel 2.7
Cascading Keselarasan Renstra dan Cross Cutting Program Kegiatan 2023

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja Awal 2021	Target 2023	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal 2021	Target 2023	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Kinerja Awal 2021	Target 2023	Cross Cutting	
		Eselon II				Eselon III				Eselon IV/JFU				Antar Bidang	Instansi Lainnya
1	2	3		4	5	6		7	8	9		10	11	12	13
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian	1,32	1,32					2. Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota	prosentase jumlah cadangan pangan pemerintah (beras) terhadap jumlah ketersediaan /kebutuhan pangan dalam daerah	10,62	25,53	Sekretariat	BPBD, Dishub, Satpol PP, Admirek, Bulog, PT. Pos
										3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka	PPH Konsumsi (Skor)	83,3	83,6	Sekretariat dan bidang pertanian dan perikanan	Dinkes, KWT, PKK, Akademisi

Tabel 2.7
Cascading Keselarasan Renstra dan Cross Cutting Program Kegiatan 2023

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja Awal 2021	Target 2023	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal 2021	Target 2023	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Kinerja Awal 2021	Target 2023	Cross Cutting	
		Eselon II				Eselon III				Eselon IV/JFU				Antar Bidang	Instansi Lainnya
		1	2							3	4			5	6
						PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani bagi masyarakat miskin (persen)	100	100	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan PanganKecamatan				Sekretariat	Dinkes, Puskesmas, Kelurahan
						PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase Pangan segar yang aman dikonsumsi (%)	78	80	4. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan SegarDaerah Kabupaten/Kota	Jumah pengawasan keamanan pangan ke retail/pasar	12	24	Sekretariat	Disdagkoperin, UPT. Pasar
						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi ikan konsumsi (ton)	278,9	280	5. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya ikan yang diberdayakan	14	15	Sekretariat dan bidang ketahanan pangan	Fakultas Perikanan dan Kelautan UNPAD, Pokdakan Sebandung Raya, Balai Riset
							Jumlah produksi ikan hias (ekor)	2.312.000	2.350.000	6. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah benih ikan konsumsi yang dihasilkan (ekor)	75.284	93.072	Sekretariat	Budidaya, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Jabar, importir perikanan

Tabel 2.7
Cascading Keselarasan Renstra dan Cross Cutting Program Kegiatan 2023

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja Awal 2021	Target 2023	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal 2021	Target 2023	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Kinerja Awal 2021	Target 2023	Cross Cutting	
		Eselon II				Eselon III				Eselon IV/JFU				Antar Bidang	Instansi Lainnya
1	2	3		4	5	6		7	8	9		10	11	12	13
											Jumlah benih ikan hias yang dihasilkan (ekor)	4.671	7.100		
											Jumlah penerimaan retribusi (rupiah)	33.957.000	45.000.000		
											7. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagiUsaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro danKecil	Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan skla mikro dan kecil (UPI)	40	10	Sekretariat dan bidang ketahanan paangan
							PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA NPRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang disediakan dan dikembang kan	25	30	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah kawasan pengembangan prasarana pertanian	1	1	Sekretariat

Tabel 2.7
Cascading Keselarasan Renstra dan Cross Cutting Program Kegiatan 2023

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja Awal 2021	Target 2023	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal 2021	Target 2023	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Kinerja Awal 2021	Target 2023	Cross Cutting	
						Eselon II				Eselon III				Eselon IV/JFU	
		1	2			3	4			5	6			7	8
						PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Kelurahan yang dilayani)	100	100	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hewan yang divaksinasi (Rabies)	1892	2000	Sekretariat	Dinkes, Balai veteriner Subang
											Jumlah Hewan yang divaksinasi (Flu burung)	1299	1500		
										Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah hewan kurban yang diperiksa	1300	3000	Sekretariat	Dinkes, Kementrian Pertanian
											Jumlah pengujian pangan asal hewan	N/A	50		
										Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hewan yang dilayani (ekor)	6810	6250	Sekretariat dan bidang pertanian dan perikanan	Bappenda, Bappelitbangda, S yncore BLUD, RS Hewan cikole, dkpp, fak kedokteran

Tabel 2.7
Cascading Keselarasan Renstra dan Cross Cutting Program Kegiatan 2023

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja Awal 2021	Target 2023	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal 2021	Target 2023	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Kinerja Awal 2021	Target 2023	Cross Cutting	
		Eselon II				Eselon III				Eselon IV/JFU				Antar Bidang	Instansi Lainnya
1	2	3		4	5	6		7	8	9		10	11	12	13
											Jumlah penerimaan retribusi	229.870.000	262.500.000		hewan unpad,SMK pangalengan
						PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase izin usaha pertanian yang dilayani (persen)	N/A	100	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang KegiatanUsahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi perizinan	5	5	Sekretariat	DPMPTSP, para pelaku usaha pertanian, perikanan dan peternakan
						PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	Persen	10	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang naik skor kelompok;	11	6	Sekretariat dan bidang ketahanan pangan	Petani, penyuluh pertanian
Menurunnya Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses	Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan	100	100	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani	100	100	Penanganan Kerawanan Pangan KewenanganKabupaten/Kota	Jumlah penanganan kasus kerawanan pangan (KK)	750	2000	Sekretariat, bidang pertanian dan perikanan	Dinkes, Dinsos, Admirek, Satpol PP, Dishub

Tabel 2.7
Cascading Keselarasan Renstra dan Cross Cutting Program Kegiatan 2023

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja Awal 2021	Target 2023	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal 2021	Target 2023	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Kinerja Awal 2021	Target 2023	Cross Cutting	
		Eselon II				Eselon III				Eselon IV/JFU				Antar Bidang	Instansi Lainnya
		1	2			3	4			5	6			7	8
		ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	kerawanan pangan				bagi masyarakat miskin (persen)				Jumlah penyaluran cadangan pangan pada kasus kerawanan pangan (Kali)	1	2		
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian	N/A	30	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (nilai)	BB	BB	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	19	19	Bidang ketahanan pangan, bidang pertanian dan perikanan	TAPD, Bappelitbangda, BPKAD, Inspektorat, Organisasi, Pemerintahan, Adbang, Bappenda
	Opini BPK						Nilai IKM Perangkat Daerah (nilai)	80,4	80,5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan gaji ASN/P3K Perangkat Daerah	13	13	Bidang ketahanan pangan, bidang pertanian dan perikanan	BPKAD, BKPSDMD, Adbang
							Indeks Profesionalitas ASN (nilai)	N/A	45		Jumlah bulan tunjangan ASN/P3K Perangkat Daerah	14	14		

Tabel 2.7
Cascading Keselarasan Renstra dan Cross Cutting Program Kegiatan 2023

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja Awal 2021	Target 2023	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal 2021	Target 2023	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Kinerja Awal 2021	Target 2023	Cross Cutting	
		Eselon II				Eselon III				Eselon IV/JFU				Antar Bidang	Instansi Lainnya
		1	2			3	4			5	6			7	8
											Jumlah PNS/P3K perangkat daerah yang mendapatkan gaji dan tunjangan	52	52		
										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi Administrasi Kepegawaian untuk pengembangan kompetensi	52	52	Bidang ketahanan pangan, bidang pertanian dan perikanan	BKPSDMD
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan dukungan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	12	12	Bidang ketahanan pangan, bidang pertanian dan perikanan	BPKAD asset, BKPSDMD

Tabel 2.7
Cascading Keselarasan Renstra dan Cross Cutting Program Kegiatan 2023

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja Awal 2021	Target 2023	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal 2021	Target 2023	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Kondisi Kinerja Awal 2021	Target 2023	Cross Cutting	
		Eselon II				Eselon III				Eselon IV/JFU				Antar Bidang	Instansi Lainnya
1	2	3		4	5	6		7	8	9		10	11	12	13
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan dukungan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	12	Bidang ketahanan pangan, bidang pertanian dan perikanan	BPKAD asset, BKPSDMD
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	12	2	Bidang ketahanan pangan, bidang pertanian dan perikanan	BPKAD asset

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan perencanaan dan capaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan telah disusun sesuai dengan visi dan misi Kota Cimahi, berdasarkan RPD Kota Cimahi dan Renstra Dinas pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2023 – 2026.
2. Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai evaluasi reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian menunjukkan bahwa Dispangtan selalu berusaha berkinerja semakin baik, menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
3. Meskipun berkarakteristik perkotaan, Kota Cimahi memiliki lahan pertanian dan produksi pangan yang mencakup tanaman dan hortikultura. Selain itu, Kota Cimahi juga memiliki area yang dapat memproduksi hasil perikanan dan peternakan. Produksi tanaman pangan terbesar tahun 2022 adalah gabah sebesar 1.206,4 ton sehingga dapat menghasilkan beras sebesar 796,08 ton. Produksi terbesar di Kota Cimahi tahun 2022 berasal dari tanaman hortikultura, yaitu jeruk nipis dengan produksi bersih mencapai 1.530 ton sehingga total produksi buah-buahan di Kota Cimahi tahun 2022 terhitung sebesar 1.948 ton. Dari kelompok sayur-sayuran, Kota Cimahi mampu menghasilkan produksi sebesar 985,7 ton dengan jumlah produksi terbanyak berasal dari 305,5 ton kangkung. Pangan sumber protein yang berasal dari peternakan dan perikanan juga diproduksi oleh Kota Cimahi. Produksi daging terbanyak berasal dari kelompok ruminansia, yaitu daging sapi sebesar 123,3 ton dan dari kelompok unggas, yaitu daging ayam buras sebesar 12,3 ton. Produksi telur memberikan kontribusi terhadap nilai produksi pangan hewani sebesar 39 ton yang berasal dari produksi telur ayam buras dan

telur itik. Sementara itu, susu sapi yang dihasilkan di Kota Cimahi tahun 2022 mencapai 1.394 ton.

4. Sasaran strategis 3, Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah dengan indikator Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan. Hal yang dilakukan pertama melalui pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah sedini mungkin dan kedua melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis melalui program-program sehingga rawan pangan di wilayah tersebut dapat tertangani, dan penanggulangan daerah rawan transien melalui bantuan sosial.

4.2 Kendala dan Hambatan

Secara umum kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Ketersediaan dan kerawanan pangan;
2. Fluktuasi harga pangan;
3. Wabah penyakit hewan;
4. Keanekaragaman dan keamanan pangan;
5. Alih fungsi lahan pertanian;

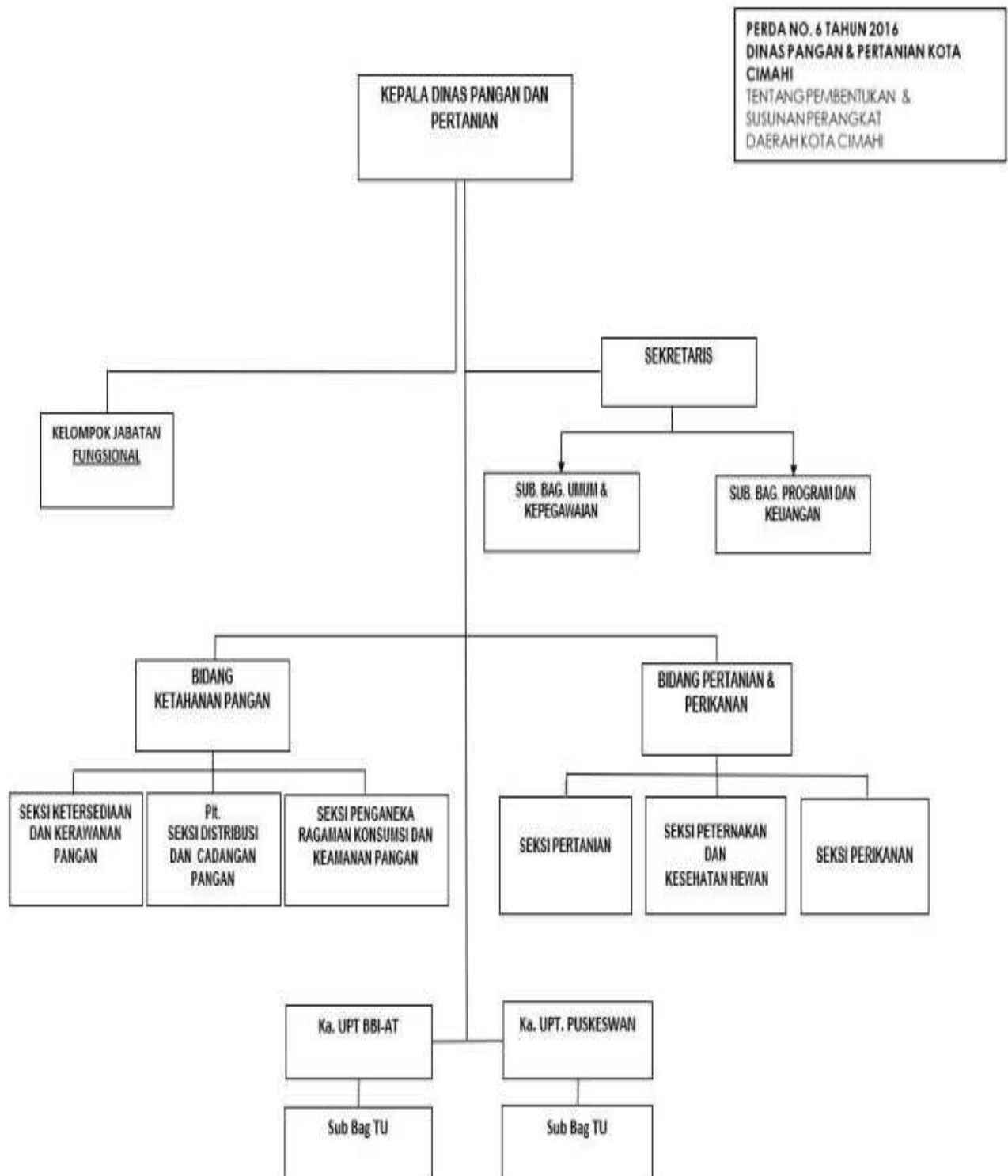
4.3 Upaya Tindak Lanjut

Strategi utama yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan, khususnya pada aspek ketersediaan pangan adalah peningkatan jumlah dan keragaman pangan terutama pada kelompok umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan dan gula melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mempertahankan produksi pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan melalui :
 - a) Menjaga alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian;
 - b) Optimalisasi pemanfaatan lahan sub optimal, lahan tidur, lahan kering maupun lahan pekarangan untuk pangan;
 - c) Meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura

- d) Mengembangkan *urban farming* di lahan sempit dengan berbagai bentuk, seperti kebun komunitas, berkebun di atap atau balkon rumah, budikdamber, dan lainnya.
- 2. Mendorong pengembangan industri mikro, kecil, dan menengah yang bergerak dalam olahan pangan lokal
- 3. Penguatan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kota
- 4. Menjamin ketersediaan pangan melalui upaya stabilitas pasokan pangan, terutama yang berkaitan dengan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- 5. Meningkatkan upaya pengendalian harga dan stok pangan, terutama yang berkaitan dengan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- 6. Mencegah dan mengurangi terjadinya *food loss* dan *food waste* di setiap tahap rantai pasok, yaitu produksi, pasca panen, dan penyimpanan, pemrosesan, dan pengemasan, distribusi dan pemasaran, serta konsumsi;
- 7. Meningkatkan manajemen data pokok ketersediaan pangan, yaitu :
 - a) Pencatatan data produksi pangan yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan secara rutin;
 - b) Pencatatan data perdagangan pangan untuk mengetahui tingkat kecukupanpenyediaan pangan secara rutin;
- 8. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas lintas sektor dalam upaya penyediaan panganyang cukup baik dari segi jumlah maupun keragamannya;

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI



[MISI 2] Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
[MISI 3] Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi daerah
[MISI 4] Mewujudkan Kesenjangan Pembangunan yang Berkeadilan

[illegible]

TUJUAN	INDIKAT OR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja Awal 2021	2023	2024	2025	2026	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal 2021	2023	2024	2025	2026	KEGIATAN	INDIKATO R KEGIATAN	Kondisi Kinerja Awal 2021	2023	2024	2025	2026	Cross Cutting	
		Eselon II																					Antar Bidang	Instansi Lainnya
		Eselon III																						
1	2	8		9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20		21	22	23	24	25		26
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi ikan konsumsi (ton)	278,9	280	290	300	310	5. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya ikan yang diberdayakan	14	15	1	1	1	Sekretariat	Fakultas Perikanan dan Kelautan UNPAD, Pokdakan Sebandung
										Jumlah produksi ikan hias (ekor)	2.312.000	2.350.000	2.375.000	2.380.000	2.400.000	6. Pengelolaan Pembudidayaa n Ikan	Jumlah benih ikan konsumsi yang dihasilkan	75.284	93.072	97.725	108.000	119.000	Sekretariat, bidang Pertanian dan Perikanan	Raya, Balai Riset Budidaya, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Jabar, importir perikanan
																	Jumlah benih ikan hias yang dihasilkan (ekor)	4.671	7.100	7.500	8.250	9.750		
																	Jumlah penerimaan retribusi (rupiah)	33.957.000	45.000.000	47.000.000	50.000.000	55.000.000		
																	7. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagiUsaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro danKecil	Jumlah usaha pengolahan dan pemasar produk hasil perikanan skla mikro dan kecil (UPI)	40	10	10	10	10	Sekretariat dan bidang ketahanan paangan
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	25	30	30	40	50	Pengemban gan Prasarana Pertanian	Jumlah kawasan pengemba ngan prasarana pertanian	1	1	1	1	1	Sekretariat	Bidang hukum setda, Unpad, dpmptsp, BPN
									PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DANKESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Kelurahan yang dilayani)	100	100	100	100	100	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan danPembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan MenularDalam daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Hewan yang divaksinasi (Rabies)	1892	2000	2000	2000	2000	Sekretariat	Dinkes, Balai veteriner Subang
																	Jumlah Hewan yang divaksinasi (Flu burung)	1299	1500	1500	1500	1500		
																Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan danProduk Hewan Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah hewan kurban yang diperiksa	1300	3000	3000	3000	3000	Sekretariat	Dinkes dan Balai Veteriner Subang
																	Jumlah pengujian pangan asal hewan	N/A	50	50	50	50		
																Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan JasaMedik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Hewan yang dilayani (ekor)	6810	6250	6500	6750	7000	Sekretariat, bidang Pertanian dan Perikanan	Bappenda, Bappelitbangda, Syncore BLUD,RS Hewan cikole, dkpp,fak kedokteran hewan unpad,SMK pangalengan
									Jumlah penerimaan retribusi	229.870.000	262.500.000	275.625.000	289.400.000	303.875.000										

TUJUAN	INDIKAT OR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja Awal 2021	2023	2024	2025	2026	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal 2021	2023	2024	2025	2026	KEGIATAN	INDIKATO R KEGIATAN	Kondisi Kinerja Awal 2021	2023	2024	2025	2026	Cross Cutting	
		Eselon II							Eselon III							Eselon IV/JFU							Antar Bidang	Instansi Lainnya
1	2	8		9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20		21	22	23	24	25		26
									PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase izin usaha pertanian yang dilayani (persen)	N/A	100	100	100	100	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang KegiatanUsahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi perizinan	5	5	5	5	5	Sekretariat	DPMPTSP, para pelaku usaha pertanian, perikanan dan peternakan
									PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	Persen	10	10	10	10	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang naik skor kelompok;	11	6	6	6	6	Sekretariat dan bidang ketahanan pangan	Petani, penyuluh pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Jabar
Menurunnya Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan	100	100	100	100	100	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani bagi masyarakat miskin (persen)	100	100	100	100	100	Penanganan Kerawanan Pangan KewenanganKabupaten/Kota	Jumlah penanganan kasus kerawanan pangan (KK)	750	2000	2000	2000	2000	Sekretariat dan bidang pertanian dan perikanan	Bapanas, Dinkes, Dinsos, Admirek, Satpol PP, Dishub
																	Jumlah penyaluran cadangan pangan pada kasus kerawanan pangan (Kali)	1	2	2	2	2		
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian	N/A	30	30	35	40	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (nilai)	BB	BB	BB	BB	BB	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	19	19	19	19	19	Bidang ketahanan pangan dan bidang pertanian dan perikanan	TAPD, Bappelitbangda, BPKAD, Inspektorat, Organisasi, Pemerintahan, Adbang, Bappenda
	Opini BPK									Nilai IKM Perangkat Daerah (nilai)	80,4	80,5	80,5	81	81	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan gaji ASN/P3K Perangkat Daerah	13	13	13	13	13	Bidang ketahanan pangan dan bidang pertanian dan perikanan	BPKAD, BKPSDMD, Adbang
		Indeks Profesionalitas ASN (nilai)	N/A	45	46	48	50			Jumlah bulan tunjangan ASN/P3K Perangkat Daerah	14	14	14	14	14	Bidang ketahanan pangan dan bidang pertanian dan perikanan	BKPSDMD							
								Jumlah PNS/P3K perangkat daerah yang mendapatkan gaji dan tunjangan		52	52	52	52	52										
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang difasilitasi Administrasi Kepegawaian untuk pengembangan kompetensi	52	52	52	52	52			Bidang ketahanan pangan dan bidang pertanian dan perikanan	BKPSDMD					
											Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan dukungan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	12	12	12	12	12	Bidang ketahanan pangan dan bidang pertanian dan perikanan	BPKAD asset, BKPSDMD					

TUJUAN	INDIKAT OR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja Awal 2021	2023	2024	2025	2026	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal 2021	2023	2024	2025	2026	KEGIATAN	INDIKATO R KEGIATAN	Kondisi Kinerja Awal 2021	2023	2024	2025	2026	Cross Cutting	
		Eselon II							Eselon III							Eselon IV/JFU							Antar Bidang	Instansi Lainnya
1	2	8		9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20		21	22	23	24	25		26
																Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan dukungan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintaha n daerah	12	12	12	12	12	Bidang ketahanan pangan dan bidang pertanian dan perikanan	BPKAD asset, BKPSDMD
																Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah sesuai	12	2	2	2	2	Bidang ketahanan pangan dan bidang pertanian dan perikanan	BPKAD asset



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TITA MARIAM, S.Pt., M.M.**
Jabatan : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc.**
Jabatan : Pj. Wali Kota Cimahi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, November 2023

Pihak Kedua,

Pj. WALI KOTA CIMAHI,

Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc.

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA CIMAHI,**

TITA MARIAM, S.Pt., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700706 199803 2 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan	Nilai PPH Ketersediaan (Nilai)	2350
		Skor PPH Ketersediaan (Skor/Nilai)	68
		Presentase peningkatan nilai PDRB sektor pertanian (persen)	1,32
2	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan (persen)	100
3	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian (nilai)	30

Program		Anggaran	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	9.998.410.292,00
2.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	778.637.978,00
3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	154.020.100,00
4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	78.743.800,00
5.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	663.338.320,00
6.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp	130.303.300,00
7.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	49.043.850,00
8.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	956.070.978,00
9.	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp	9.382.600,00
10.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp	410.109.400,00
Jumlah Anggaran		Rp	13.228.060.618,00

Cimahi, November 2023

PJ. WALI KOTA CIMAHI,



Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc.

**KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA CIMAHI,**



TITA MARIAM, S.Pt., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700706 199803 2 006

**PENGUKURAN KINERJA
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI
TAHUN 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target %	Realisasi %	Capaian %	Program	Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)						
1.	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian	30	77,05	256,8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.998.410.292	9.488.108.202	95
2.	Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan	Nilai PPH Ketersediaan	2350	2183	92,89	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	752.692.368	695.662.007	89,3
		Skor PPH Ketersediaan	67,9	89,6	131,95	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	78.743.800	75.795.500	96
		Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian (Persen)	1,32	1,55	117,42	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	92.633.150	92.472.200	100
						PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	130.303.300	126.654.902	97
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	49.043.850	36.993.850	75
						PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	9.382.600	9.132.600	97

						PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	410.109.400	381.252.996	93
						PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	178.366.444	148.697.510	83
3	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasil n rendah	Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan	100	100	100	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	154.020.100	120.527.750	78

Cimahi, 31 Januari 2024

Kepala Dinas Pangan dan
Pertanian kota Cimahi



TITA MARIAM, S.Pt, M.M
Pembina TK.I

NIP. 197007061998032006

Prestasi DISPANGTAN

- ❖ Juara Umum Cimahi Motekar Awards 2023 Kategori Predikat Khusus Perangkat Daerah Terinovatif
- ❖ Juara Umum Lomba Cimahi Inovation Award Tahun 2023
- ❖ Juara kedua Lomba Cimahi Inovation Award 2023 Kategori Perangkat Daerah dengan inovasi SIMANTRI (Sistem Pertanian Perkotaan Terintegrasi – Mita Mustikasari)
- ❖ Juara ketiga lomba Cimahi Inovation Award 2023 Kategori Perangkat Daerah dengan judul inovasi penggunaan Jamu Penyubur Tanaman Padi Blogro dengan teknik budidaya jajar legowo – Siti Rakhmah, Tennisul Pakki
- ❖ Juara Cipta Menu Tk Provinsi Jawa Barat dalam rangka Hari Pangan Sedunia 2023.
- ❖ Juara Pertama Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2023
- ❖ Finalis Lomba Olahsan Serba Ikan Tingkat Nasional tahun 2023
- ❖ Predikat UKPP Berprestasi Utama dalam Abdi Bakti Tani tingkat Nasional th 2023 - UPTD Puskaswan
- ❖ Juara kedua Seleksi ASN Teladan Tingkat Kota Cimahi - drh Irfan Fazar
- ❖ Juara ketiga Petugas Pelapor ISIKHNAS terbaik se Jawa Barat - drh Aldis Ingrid



